

Pendugaan Potensi
Penerimaan Negara dari

PAJAK SAWIT

di Provinsi Jambi

Transformasi untuk Keadilan Indonesia

2021

Pendugaan Potensi Penerimaan Negara dari Pajak Sawit di PROVINSI JAMBI

Penulis :

Linda Rosalina

Irlan

Muhammad Rizal

Rudiansyah

Reviewer :

Prof. Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo, MS (IPB University)

Dwi Hastuti, SE., M.Sc (Universitas Jambi)

Publikasi ini didukung oleh:

PRAKARSA

Welfare Initiative for Better Societies

Pernyataan :

Pandangan-pandangan yang dinyatakan di dalam publikasi ini bukan representasi dari The Prakarsa

Kata Pengantar

Studi ini adalah studi kedua yang kami lakukan untuk melihat potensi penerimaan negara dari pajak sawit. Pada studi pertama, kami lakukan di Sulawesi Tengah tahun 2020. Studi kedua kali ini kami laksanakan tahun 2021 untuk lingkup Jambi dengan pembaruan metode pengumpulan data. Kami lakukan observasi lapangan untuk validasi data, dan kami gunakan citra resolusi tinggi untuk analisis studi kasus. Tujuannya agar dihasilkan nilai perhitungan pajak yang paling mendekati.

Seperti kami sampaikan pada studi pertama, optimalisasi penerimaan perpajakan oleh Pemerintah menjadi latar belakang dari penyusunan studi ini. Adanya gap antara data potensi pajak sawit dengan target dan realisasinya menjadi persoalan yang hendak didalami. Pada titik ini, transparansi menjadi kunci, dan kapasitas serta penggunaan teknologi merupakan hal pertama yang harus ditingkatkan.

Jambi adalah Provinsi dengan potensi industri sektor berbasis lahan yang tinggi. Dalam konteks sektor sawit, Jambi masuk 10 besar provinsi produsen kelapa sawit di Indonesia. Sedihnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jambi masih rendah, terbesar berasal dari pajak kendaraan. Jambi juga masuk dalam langganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), seiring dengan luasnya kerusakan gambut dan tingginya konflik tenurial. Potret ini menunjukkan bahwa antara eksploitasi sumberdaya di Jambi tidak sebanding dengan penerimaan negara maupun pendapatan daerahnya.

Kami menyadari, agar dapat membuat keputusan yang tepat dibutuhkan data dan informasi yang lengkap dan akuntable. Maka, menyajikan informasi dasar (*baseline*) mengenai potret eksisting sawit di Jambi kami pikir penting untuk melihat potensi sektor sawit di Jambi secara utuh. Harapan kami ini dapat menjadi sumber alternatif informasi, sebagai pemantik agar para pengampu data mau terbuka, dan terpenting pemerintah daerah lebih serius melakukan pendataan dan pengintegrasian data dengan bersinergi antar pemerintah dan level pemerintahan. Kami juga mendorong pemerintah daerah untuk memiliki kebi jakan dengan tujuan peningkatan pendapatan daerah.

Baseline studi ini menyajikan enam informasi penting dan bersifat indikatif (dugaan). Enam *baseline* informasi tersebut terdiri atas: (1) tutupan dan status tanaman sawit, (2) produksi tandan buah segar, (3) penerimaan negara atas pajak sawit, (4) pengusahaan

perkebunan sawit, (5) sawit dalam kawasan hutan, dan (6) sawit pada lahan gambut.

Atas hadirnya kembali studi kedua ini, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada segenap yang telah berpartisipasi. Terima kasih kepada para penulis yang sudah berusaha dengan gigih dalam proses pengumpulan hingga pengolahan data. Khususnya terima kasih kepada Bapak Hariadi Kartodihardjo dari IPB University, Ibu Dwi Hastuti dari Univeristas Jambi dan Bapak Budi Arifandi dari Direktorat Jenderal Pajak, yang berkenan menjadi teman diskusi dan reviewer dalam proses penyelesaian studi ini. Terima kasih kepada The Prakarsa yang bersedia memberikan dukungan pendanaan untuk studi ini. Terima kasih sedalam–dalamnya juga kepada teman–teman yang sudah mencurahkan waktu untuk membahas studi ini yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu. Disadari sepenuhnya bahwa studi ini belum sempurna, oleh karena itu sangat penting adanya kritik maupun masukan untuk kemudian menjadi bagian penyempurnaan dari studi potensi penerimaan perpajakan pada seri selanjutnya.

Terima kasih dan selamat menikmati di setiap informasinya.

Bogor, Agustus 2021

Edi Sutrisno
Direktur Eksekutif TuK INDONESIA

Daftar Isi

Kata Pengantar *iii*

Daftar Isi *v*

Daftar Tabel *vi*

Daftar Gambar *vi*

BAB I. Pendahuluan *1*

A. Latar Belakang 1
B. Tujuan 3

BAB II. Metode *5*

A. Lokasi dan Waktu 5
B. Pengumpulan Data 5
C. Analisis Data 5

BAB III. Hasil & Pembahasan *11*

A. Tutupan dan Status Tanaman Sawit 11
B. Produktivitas Perkebunan Sawit 13
C. Penerimaan Negara dari Pajak Perkebunan Sawit 15
1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 15
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 16
3. Potensi, Target, dan Realisasi Pajak 17
D. Pengusahaan Perkebunan Sawit 18
1. Perkebunan Besar 18
2. Perkebunan Rakyat (Perkebunan Mandiri) 23
3. Kesenjangan Data 24
4. Risiko Lingkungan, Sosial, dan Tatakelola Pembangunan Sawit 25
E. Sawit dalam Kawasan Hutan 30
1. Tutupan Sawit dalam Kawasan 30
2. Areal HGU dalam Kawasan 32
F. Sawit Pada Lahan Gambut 34
1. Sawit pada Lahan Gambut 34
2. Areal HGU pada Lahan Gambut 36

BAB IV. Penutup *39*

A. Simpulan 39
B. Rekomendasi 40

Daftar Pustaka *41*

Daftar Tabel

Tabel 1 Luas Tutupan Sawit Berdasarkan Wilayah Kabupaten Provinsi Jambi Tahun 2019 *11*

Tabel 2 Luas Tutupan Sawit Berdasarkan Status Tanaman Sawit Provinsi Jambi Tahun 2019 *13*

Tabel 3 Potensi Produksi TBS (ton) di Provinsi Jambi *14*

Tabel 4 Penerimaan Negara dari Pajak Perkebunan Sawit Tahun 2020 *15*

Tabel 5 Potensi Penerimaan Negara dari Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Wilayah Kabupaten/Kota Tahun 2020 *16*

Tabel 6 Potensi Penerimaan Negara dari Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2020 *17*

Tabel 7 Perbandingan Potensi, Target, dan Realisasi Pajak di Provinsi Jambi Tahun 2020 *18*

Tabel 8 Jumlah Pemegang HGU Berdasarkan Wilayah Kabupaten Tahun 2018 *18*

Tabel 9 Daftar Pemegang HGU Berdasarkan Lokasi Kabupaten dan Luas *19*

Tabel 10 Luas Tutupan Sawit Berdasarkan Areal HGU Tahun 2019 *22*

Tabel 11 Luas HGU PBN di Provinsi Jambi *23*

Tabel 12 Luas Perkebunan Rakyat/Mandiri di Provinsi Jambi Tahun 2019 *23*

Tabel 13 *Kesenjangan Data Pengusahaan Perkebunan di Provinsi Jambi Tahun 2019* *24*

Tabel 14 Luas Area Objek Pajak PT. Erasakti Wiraforestama Tahun 2020 *29*

Tabel 15 Potensi Penerimaan Pajak PT. Erasakti Wiraforestama Tahun 2020 *30*

Tabel 16 Luas Tutupan Sawit dalam Kawasan Hutan Tahun 2019 *31*

Tabel 17 Luas HGU dalam Kawasan Hutan Tahun 2018 *32*

Tabel 18 Daftar HGU di dalam Kawasan Hutan Tahun 2018 *33*

Tabel 19 Luas Tutupan Sawit Berdasarkan Jenis Lahan Tahun 2019 *34*

Tabel 20 Daftar Pemegang HGU yang Berada pada Lahan Gambut Tahun 2018 *36*

Daftar Gambar

Gambar 1 Alur Studi *8*

Gambar 2 Sebaran Tutupan Sawit Provinsi Jambi Tahun 2019 *11*

Gambar 3 Sebaran Sawit Berdasarkan Status Tanaman Tahun 2019 *12*

Gambar 4 Tingkat Produktivitas CPO di Pulau Sumatera Tahun 2020 (Sumber: Kementerian Pertanian 2020-diolah) *13*

Gambar 5 (a) Sebaran Tutupan Sawit Berdasarkan Areal HGU; (b) PT. Inti Indosawit Subur; (c) PT. Sawit Jambi Lestari; (d) Gabungan Beberapa HGU *22*

Gambar 6 Profile Perusahaan PT. Erasakti Wiraforestama (Sumber: Ditjen AHU diakses 9 Juli 2021) *25*

Gambar 7 Kondisi Desa Rukam, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi Pasca Kehadiran PT EWF (Sumber: WALHI Jambi 2018) *29*

Gambar 8 Perbedaan Kualitas Citra yang digunakan dalam Proses Interpretasi Visual *30*

Gambar 9 Sebaran Tutupan Sawit yang berada di dalam Kawasan Hutan *31*

Gambar 10 Sebaran HGU dalam Kawasan Hutan *33*

Gambar 11 Sebaran Tutupan Sawit yang berada di Lahan Gambut *35*

BAB I
Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar di Indonesia. Realisasi penerimaan yang bersumber dari perpajakan pada tahun 2020 mencapai Rp 1.282,77 triliun, jauh lebih besar apabila dibandingkan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan hibah yang masing-masing hanya mencapai Rp 338,53 triliun dan Rp 12,29 triliun (Kemenkeu 2021).

Kontribusi penerimaan pajak dari sektor berbasis lahan seperti pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, serta pertambangan dan penggalian merupakan yang paling rendah. Sektor tersebut hanya berkontribusi pada kisaran antara 12–13% pada periode 2015–2019 (Kemenkeu 2021). Rendahnya penerimaan pajak tersebut mengharuskan pemerintah mengoptimalkan penerimaan pajak khususnya pada sektor berbasis lahan.

Salah satu sektor berbasis lahan yang harus menjadi perhatian adalah sektor pertanian. Pertanian merupakan sektor yang sangat penting bagi Indonesia terutama sebagai penyumbang terbesar ketiga Produk Domestik Bruto (PDB) yaitu 12,81% (BPS 2019).

Usaha perkebunan kelapa sawit menjadi subsektor andalan dari sektor pertanian dengan menempatkan Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia (Index Mundi 2020). Harga sawit dunia yang menunjukkan tren baik, mendukung pertumbuhan sektor ini ditengah lesunya perekonomian akibat pandemi covid19 (Kanwil DJPb Provinsi Jambi 2020).

Luas area perkebunan kelapa sawit di Indonesia terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 14,86 juta hektare atau mengalami pertambahan seluas 401 ribu hektare dari tahun sebelumnya (BPS 2019). Peningkatan luas lahan perkebunan kelapa sawit tersebut tidak berkorelasi positif terhadap peningkatan penerimaan negara atas pajak dari sektor tersebut (KPK 2016). Hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (2016) menyebutkan bahwa realisasi penerimaan pajak dari perkebunan kelapa sawit tahun 2015 hanya mencapai Rp 22,27 triliun. Sementara itu, dugaan potensi penerimaan negara atas pajak dari perkebunan kelapa sawit berkisar antara Rp 45–50 triliun (KPK 2016).

Luas area perkebunan kelapa sawit di Indonesia terus mengalami peningkatan



Data: BPS 2019

Provinsi Jambi merupakan daerah yang potensial untuk area pengembangan perkebunan ditinjau dari kondisi geografisnya (Kanwil DJPb Jambi 2020). Saat ini, berdasarkan luas dan produksinya, Jambi masuk ke dalam sepuluh besar provinsi produsen kelapa sawit di Indonesia (Kementan 2019). Besarnya potensi perkebunan kelapa sawit di Jambi belum memberikan gambaran besarnya kontribusi penerimaan negara dari sektor ini.

Tersedianya data potensi penerimaan pajak dari perkebunan kelapa sawit secara berkala sangat penting untuk mengantisipasi potensi kehilangan penerimaan negara. Data penerimaan negara atas pajak pada sektor perkebunan sawit juga dapat membantu dalam mengontrol perluasan lahan dan mendukung model bisnis yang lebih berkelanjutan (CPI 2015). Selain itu, data potensi penerimaan pajak tersebut dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan kompensasi dari dampak negatif yang ditimbulkan dari usaha kelapa sawit (CPI 2015).

Jambi masuk ke dalam sepuluh besar provinsi produsen kelapa sawit di Indonesia
(Kementan 2019)

Identifikasi luas tutupan sawit dan umur tanaman sawit dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi penginderaan jauh (*remote sensing*).

Kendala dalam penentuan potensi penerimaan pajak tersebut adalah ketersediaan data luas tutupan sawit dan status tanaman sawit. Perbedaan data tutupan sawit dan status tanaman sawit antar instansi pemerintah menjadi permasalahan dalam menghitung potensi pajak perkebunan kelapa sawit (Rosalina *et al*. 2020). Data luas tutupan sawit dan status tanaman sawit menentukan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Standar Investasi Tanaman (SIT) (Trisakti *et al.* 2013, Soedomo *et al.* 2015 & Rosalina *et al.* 2020).

Identifikasi luas tutupan sawit dan umur tanaman sawit dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi penginderaan jauh (*remote sensing*). Penelitian terkait penggunaan teknologi penginderaan jauh dalam mengidentifikasi luas tutupan sawit dan umur tana man sawit telah banyak dilakukan. Trisakti *et al*. (2013) juga berhasil menentukan luas dan umur tanaman sawit untuk menghitung NJOP perkebunan kelapa sawit menggunakan citra satelit Landsat TM. Carolita *et al*. (2014) melakukan identifikasi umur tanaman sawit dan pola pertumbuhan tanaman sawit menggunakan Landsat 8 di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

Penelitian terkait pemanfaatan penginderaan jauh dalam sektor perkebunan kelapa sawit saat ini masih terbatas hanya dalam penentuan luas tutupan, umur dan pola pertumbuhan, dan tingkat produksi. Padahal data yang diperoleh dari pemanfaatan teknologi penginderaan jauh tersebut dapat digunakan dalam menduga potensi penerimaan pajak perkebunan kelapa sawit.

Penelitian ini menggunakan pendekatan berbasis penginderaan jauh untuk mengetahui tutupan sawit dan status tanaman sawit di Provinsi Jambi. **Data tutupan dan status tanaman sawit akan digunakan untuk menghitung penerimaan negara atas pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Data ini sangat dibutuhkan untuk mengetahui potensi penerimaan negara dari perkebunan sawit.**

B. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam studi ini adalah sebagai berikut:

a. ▶ **Menyusun kajian potensi pajak di sektor kelapa sawit untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara**

b. ▶ **Sosialisasi hasil estimasi potensi pajak di sektor perkebunan kelapa sawit untuk mendorong transparansi dalam peningkatan penerimaan negara.**

BAB II
Metode

Metode yang digunakan pada studi ini merupakan pengembangan dari studi Rosalina *et al.* (2020) mengenai Penerimaan Negara Sektor Perkebunan Sawit Sulawesi Tengah. Pengembangan metode yang dimaksud dalam studi ini yaitu melakukan observasi lapangan untuk validasi data, dan menggunakan citra resolusi tinggi untuk analisis studi kasus. Tujuannya agar dihasilkan nilai perhitungan pajak yang paling mendekati.

A. Lokasi dan Waktu

Studi ini dilaksanakan di Provinsi Jambi. Waktu pelaksanaan studi dilakukan pada Februari hingga Juni 2021.

B. Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam studi ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer terdiri atas Citra Landsat 8 tahun perekaman 2019, Citra Google Satelit tahun perekaman 2019–2020, dan Citra Spot-6 tahun perekaman 2020. Sementara data sekunder meliputi peta Hak Guna Usaha (HGU), peta kawasan hutan, peta kawasan gambut, peta administrasi, data produksi dan produktivitas *Crude Palm Oil* (CPO), data harga tanah, dan data Biaya Investasi Tanaman (BIT).

C. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam studi ini meliputi:

1. Analisis Tutupan Sawit

Analisis yang digunakan untuk memperoleh data tutupan sawit di Provinsi Jambi adalah interpretasi visual (delineasi). Citra yang digunakan dalam proses delineasi adalah citra Google Satelite tahun perekaman 2019–2020 dengan resolusi 1,5 meter dan citra SPOT-6 tahun perekaman 2020. Metode interpretasi citra yang digunakan dalam studi ini adalah interpretasi manual (digitasi *on screen*). Metode ini dapat menghasilkan akurasi tinggi jika dilakukan secara teliti dan dilakukan oleh interpreter yang berpengalaman.

Dalam studi ini, klasifikasi tutupan sawit berdasarkan skala usaha perkebunan juga dilakukan untuk mengetahui tutupan sawit Perkebunan Rakyat (PR) mandiri. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan bahwa luas areal untuk perkebunan rakyat mandiri yaitu kurang dari 25 hektare.

2. Analisis Status Tanaman Sawit

Status tanaman merupakan variabel yang menentukan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk sektor perkebunan. Data status tanaman sawit dapat diperoleh dengan mengetahui umur tanaman.

Cara yang digunakan untuk mengetahui status tanaman sawit dengan metode berbasis penginderaan jauh (*remote sensing*). Salah satu metode penginderaan jauh untuk mengetahui umur tanaman sawit yaitu dengan menggunakan indeks vegetasi. Indeks vegetasi yang digunakan untuk mengetahui status atau umur tanaman sawit dalam penelitian ini adalah *Normalize Differential Vegetation Index* (NDVI).

Tahapan yang dilakukan dalam analisis ini meliputi:

(i) pembuatan citra sintetis *Normalize Differential Vegetation Index* (NDVI);

(ii) penentuan nilai ambang batas status atau tanaman sawit berdasarkan nilai piksel citra NDVI;

(iii) *overlay* citra NDVI dengan tutupan sawit eksisting; dan

(iv) perhitungan luas masing-masing kelas status tanaman sawit.

3. Penentuan Produktivitas Tandan Buah Segar Sawit

Barang Kena Pajak (BKP) untuk usaha perkebunan kelapa sawit adalah Tandan Buah Segar (TBS). Penentuan produktivitas TBS dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan yaitu berdasarkan tingkat ekstraksi CPO atau *oil extraction rate* (OER) dan tingkat produktivitas TBS berdasarkan hasil wawancara lapangan. Data produksi CPO yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian (2020) akan dikonversi menjadi data produktivitas TBS 2020 di Provinsi Jambi. Tingkat OER yang digunakan untuk menentukan produksi TBS tersebut adalah 20%. Sedangkan data produktivitas TBS yang diperoleh dari hasil wawancara menggunakan nilai terendah. Dua data produktivitas TBS tersebut akan digunakan untuk menghitung besaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) perkebunan kelapa sawit di Provinsi Jambi.

4. Perhitungan Pajak Perkebunan Sawit

Jenis pajak yang dianalisis dalam penelitian ini adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sementara untuk Pajak Penghasilan (PPh) tidak dianalisis karena keterbatasan akses data dalam penentuan peredaran bruto.

a) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan atau pajak yang ditentukan oleh keadaan objek, yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan (Sudomo *et. al* 2018). Tarif Pajak Bumi dan Bangunan telah diatur dalam Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan.

Perhitungan besaran PBB dilakukan menggunakan persamaan:

PBB = Tarif PBB × NJKP × (NOJP - NOJPTKP)

Dimana tarif PBB telah ditetapkan sebesar 0.5%. Tarif NJKP adalah Nilai Jual Kena Pajak yang telah ditetapkan sebesar 40% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Harga NJOP untuk lahan perkebunan telah ditetapkan melalui Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 139/PMK.03/2014 Tentang Klasifikasi Dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan. Harga jual tanah untuk areal perkebunan yang digunakan dalam studi ini adalah Rp 10.000 per m2 (klas 147) berdasarkan hasil observasi per April 2021.

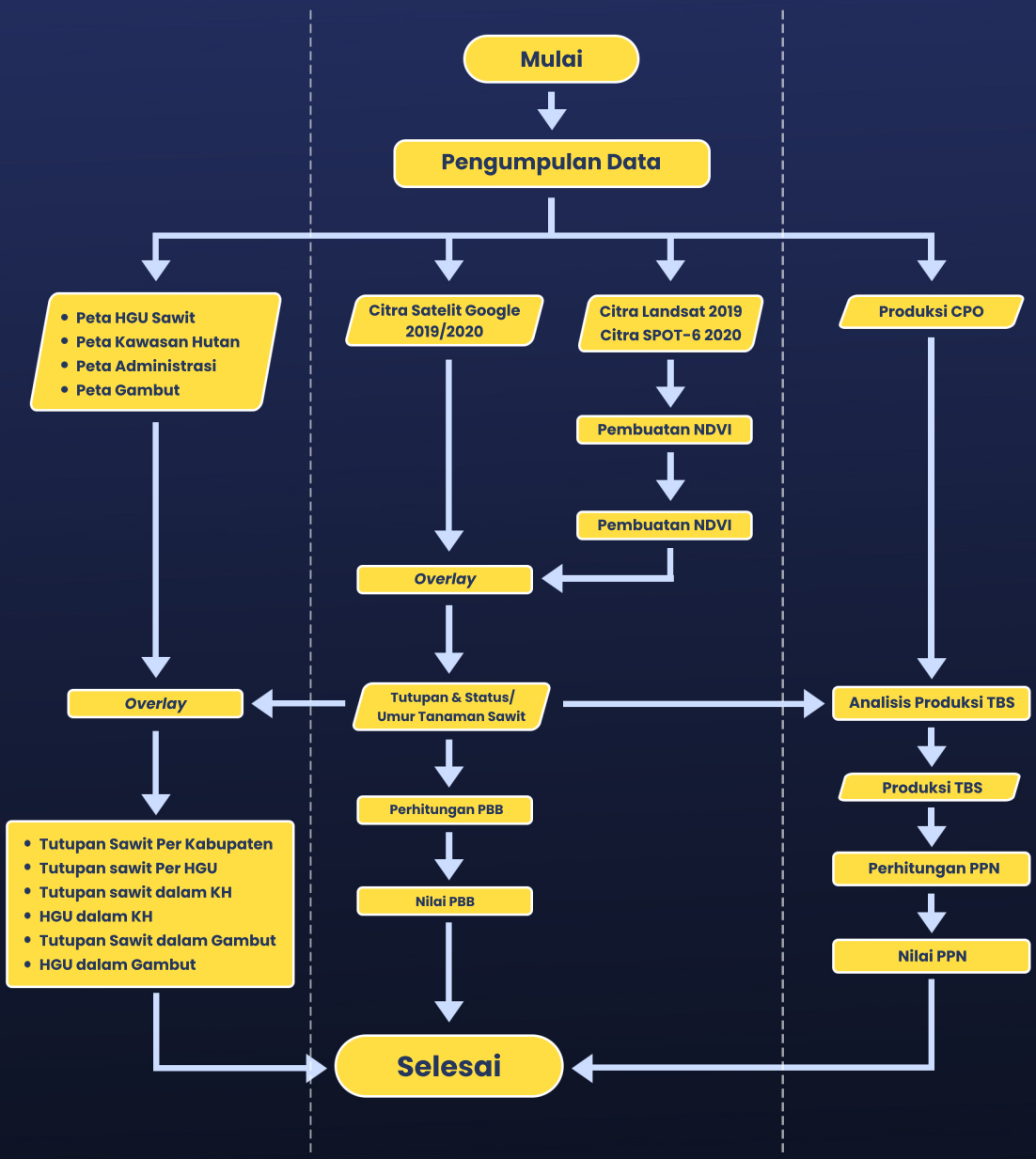
Perhitungan PBB hanya dilakukan pada NJOP bumi dan tidak dilakukan pada NJOP bangunan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 186/PMK.03/2019 Tentang Klasifikasi Objek Pajak Dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan, NJOP bumi Sektor Perkebunan meliputi lima areal yakni produktif, belum produktif, tidak produktif, pengaman dan emplasemen. Perhitungan nilai PBB pada studi ini dilakukan pada areal produktif perkebunan sawit. Areal produktif merupakan areal yang telah ditanami tanaman perkebunan, meliputi tanah dan pengembangan tanah berupa tanaman yang terdiri atas tanaman belum menghasilkan (TBM), tanaman menghasilkan (TM) dan tanaman tidak menghasilkan (TTM).

b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Perhitungan besaran PPN dilakukan menggunakan persamaan sebagai berikut:

PPN = Tarif × Produksi TBS × Harga TBS per satuan

Dimana PPN adalah besaran pajak pertambahan nilai (rupiah), Tarif adalah persentase biaya PPN (10%), produksi TBS adalah jumlah tandan buah segar sawit dalam satuan ton dan Harga TBS adalah harga tandan buah segar per ton dengan asumsi telah dikurangi biaya penanaman, perawatan dan lain-lain. Sementara itu, harga TBS yang digunakan dalam studi ini yaitu Rp 2.200 per kilogram berdasarkan hasil observasi per April 2021.

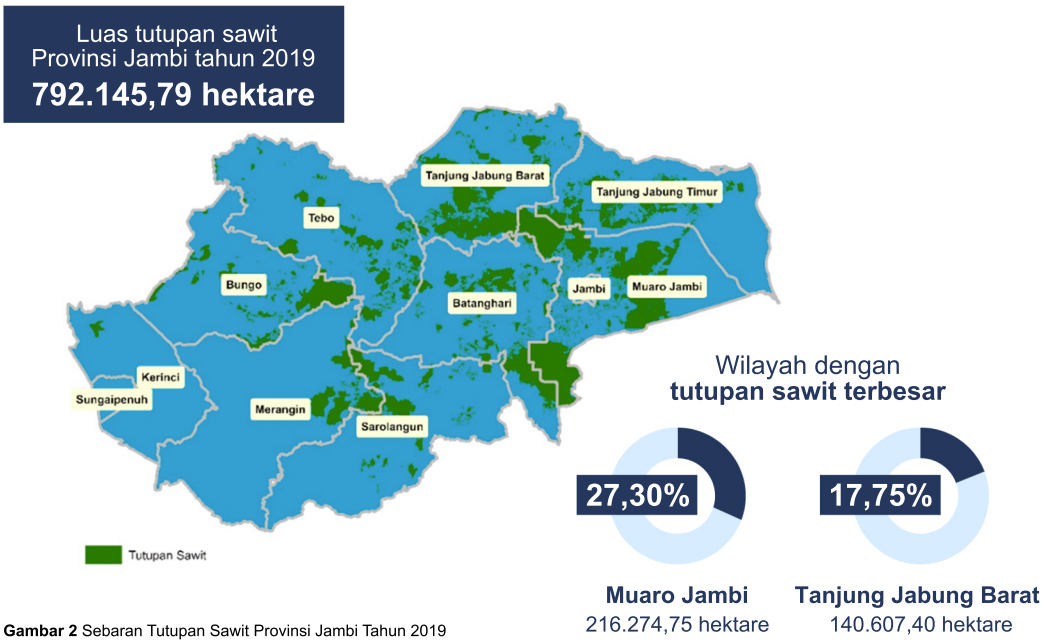


Gambar 1 Alur Studi

BAB III

Hasil & Pembahasan

A. Tutupan dan Status Tanaman Sawit



Gambar 2 Sebaran Tutupan Sawit Provinsi Jambi Tahun 2019

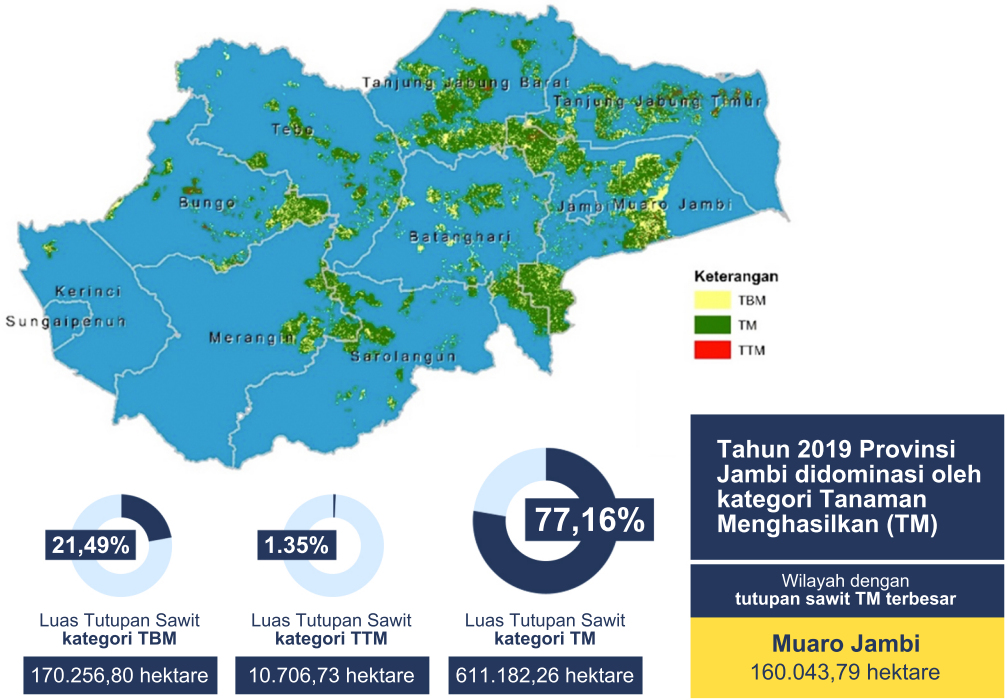
Hasil identifikasi tutupan sawit menunjukkan bahwa luas tutupan sawit Provinsi Jambi tahun 2019 yaitu 792.145,79 hektare. Wilayah kabupaten/kota yang memiliki tutupan sawit terbesar adalah Muaro Jambi (27,30%) dan Tanjung Jabung Barat (17,75%). Sementara itu, wilayah yang tidak memiliki tutupan sawit hanya di Kota Sungaipenuh. Secara lebih rinci, luas dan sebaran tutupan sawit berdasarkan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jambi dapat dilihat pada Tabel 1 dan Gambar 2.

No.	Kabupaten/Kota	Tutupan Sawit (ha)	Persentase (%)
1.	Batanghari	94.435,87	11,92
2.	Bungo	71.204,89	8,99
3.	Kerinci	3.150,41	0,40
4.	Merangin	48.286,35	6,10
5.	Muaro Jambi	216.274,75	27,30
6.	Sarolangun	55.928,00	7,06
7.	Tanjung Jabung Barat	140.607,40	17,75
8.	Tanjung Jabung Timur	85.160,12	10,75
9.	Tebo	77.033,74	9,72
10.	Jambi	64,26	0,01
11.	Sungaipenuh	-	-
	Total	*792.145,79*	*100,00*

Sumber: Hasil Olahan (2019)

Tabel 1 Luas Tutupan Sawit Berdasarkan Wilayah Kabupaten Provinsi Jambi Tahun 2019

Data tutupan sawit yang diperoleh dari hasil interpretasi citra digunakan untuk menganalisis status tanaman sawit di Provinsi Jambi. Status tanaman sawit menggambarkan fase umur tanaman sawit yang akan dijadikan dasar dalam penentuan biaya investasi tanaman (BIT) perkebunan sawit. Berdasarkan Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-149/PJ/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-64/PJ 2010, fase tanaman sawit meliputi fase tanaman belum menghasilkan (TBM) dan tanaman menghasilkan (TM). Sementara itu, untuk tanaman sawit yang sudah tidak menghasilkan (TTM) atau kategori tanaman sawit yang lebih dari 25 tahun, harga NJOP dihitung berdasarkan asumsi harga tanah (Soedomo *et al*. 2018).



Gambar 3 Sebaran Sawit Berdasarkan Status Tanaman Tahun 2019

Hasil klasifikasi tutupan sawit berdasarkan status tanaman sawit menunjukkan bahwa tanaman sawit yang terdapat di Provinsi Jambi pada tahun 2019 didominasi oleh kategori Tanaman Menghasilkan (TM). Tutupan sawit kategori TM memiliki luas yaitu 611.182,26 hektare (77,16%). Kabupaten/Kota dengan luas tutupan sawit TM terbesar adalah Kabupaten Muaro Jambi (160.043,79 hektare). Tutupan sawit kategori TBM dan TTM masing-masing memiliki luas 170.256,80 hektare (21,49%) dan 10.706,73 hektare (1.35%). Secara lebih rinci, luas dan sebaran status tanaman sawit berdasarkan wilayah kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 2 dan Gambar 3.

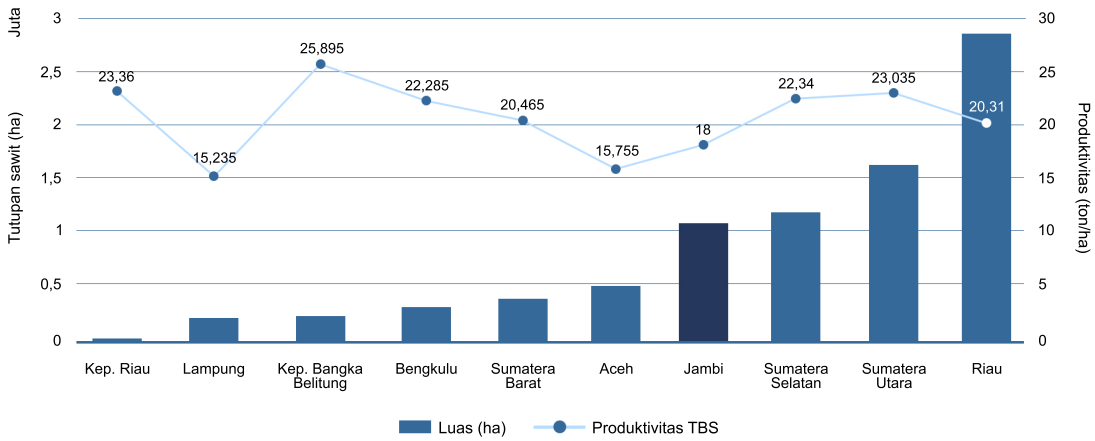
Kabupaten / Kota	Status Tanaman (Ha)			
	TBM	TM	TTM	Total
Batanghari	23.343,34	70.829,09	263,44	94.435,87
Bungo	15.655,50	53.619,80	1.929,59	71.204,89
Kerinci	851,84	2.198,66	99,90	3.150,41
Merangin	8.532,14	39.651,23	102,98	48.286,35
Muaro Jambi	53.558,52	160.043,79	2.672,45	216.274,75
Sarolangun	7.428,93	48.237,22	261,85	55.928,00
Tanjung Jabung Barat	26.642,12	113.160,31	804,98	140.607,40
Tanjung Jabung Timur	19.991,36	61.608,60	3.560,16	85.160,12
Tebo	14.243,27	61.779,32	1.011,15	77.033,74
Jambi	9,78	54,24	0,24	64,26
Sungaipenuh	-	-	-	-
Total (ha)	***170.256,80***	***611.182,26***	***10.706,73***	***792.145,79***
Persentase (%)	***21.49***	***77.16***	***1.35***	***100***

Sumber: Hasil Olahan (2019)

Tabel 2 Luas Tutupan Sawit Berdasarkan Status Tanaman Sawit Provinsi Jambi Tahun 2019

B. Produktivitas Perkebunan Sawit

Produktivitas perkebunan sawit di Pulau Sumatera sangat beragam. Produktivitas perkebunan kelapa sawit sangat ditentukan oleh beberapa faktor seperti kesesuaian lahan, kualitas bibit, teknis pengelolaan dan pemanenan serta faktor lingkungan (Salmiyati *et al.* 2014). Berdasarkan data Kementerian Pertanian (2020), Provinsi Kep. Bangka Belitung memiliki produktivitas TBS yang paling tinggi (25,90 ton/ha). Sementara itu, produktivitas TBS perkebunan kelapa sawit Provinsi Jambi hanya mencapai 18 ton/ha. Secara lebih rinci, data luas dan produktivitas TBS seluruh provinsi yang ada di Pulau Sumatera dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4 Tingkat Produktivitas CPO di Pulau Sumatera Tahun 2020
(Sumber: Kementerian Pertanian 2020-diolah)

Produksi TBS perkebunan sawit di Provinsi Jambi dapat dilihat pada Tabel 3. Hasil perhitungan produksi TBS Provinsi Jambi berdasarkan data produktivitas yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian (2020) yaitu 11.001.280,69 ton. Jika berdasarkan pada asumsi produktivitas TBS yang diperoleh dari hasil wawancara lapangan maka TBS yang dihasilkan dari perkebunan sawit Provinsi Jambi yaitu 12.317.287,23 ton pada tahun 2020. Kabupaten Muaro Jambi menghasilkan produksi TBS terbesar di Provinsi Jambi. Produksi TBS Kabupaten Muaro Jambi berkisar antara 22,20–26,19 persen dari total produksi TBS.

Tabel 3 Potensi Produksi TBS (ton) di Provinsi Jambi

No.	Kabupaten/Kota	Produksi TBS (ton)*	Produksi TBS (ton)**
1.	Batanghari	1.274.923,70	1.699.898,27
2.	Bungo	965.156,32	1.286.875,10
3.	Kerinci	39.575,92	52.767,89
4.	Merangin	713.722,05	900.208,42
5.	Muaro Jambi	2.880.788,15	2.733.944,30
6.	Sarolangun	868.270,02	894.217,76
7.	Tanjung Jabung Barat	2.036.885,60	2.386.268,97
8.	Tanjung Jabung Timur	1.108.954,87	879.135,53
9.	Tebo	1.112.027,67	1.482.669,14
10.	Jambi	976,39	1.301,85
11.	Sungaipenuh	-	-
	Total	***11.001.280,69***	***12.317.287,23***

Sumber: Hasil Olahan (2020)

Keterangan:

** Produksi TBS berdasarkan data produktivitas tanaman sawit Kementerian Pertanian 2020 (18 ton/ha-diolah)*

*** Produksi TBS berdasarkan data produktivitas tanaman sawit hasil wawancara lapangan per April 2021 (mineral: 24 ton/ha & gambut: 1,2 ton/ha)*

Perbedaan produksi TBS Provinsi Jambi pada Tabel 3 dikarenakan perbedaan penggunaan nilai produktivitas TBS. Data produktivitas TBS di Provinsi Jambi yang diperoleh hasil wawancara lapangan terbagi atas dua yaitu produktivitas pada lahan mineral (24 ton/ha) dan gambut (1,2 ton/ha). Perkebunan sawit pada lahan gambut memiliki produktivitas yang lebih rendah jika dibandingkan pada lahan mineral. Hasil yang sama juga diperoleh Budianto (2016) dimana produktivitas sawit pada lahan gambut lebih rendah dari lahan mineral. Pengelolaan perkebunan sawit di lahan gambut memiliki biaya yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan perkebunan sawit di lahan mineral (Sari *et al.* 2019). Sehingga pengelolaan yang tidak maksimal menyebabkan rendahnya produksi TBS.

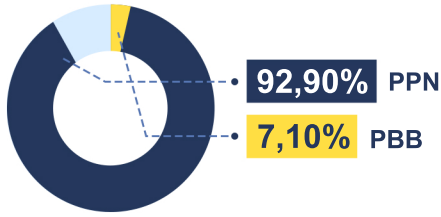
C. Penerimaan Negara dari Pajak Perkebunan Sawit

Penerimaan negara yang dihitung dalam studi ini adalah penerimaan negara yang bersumber dari PBB dan PPN. Potensi penerimaan negara dari PBB dan PPN di Provinsi Jambi tahun 2020 masing-masing dapat dilihat pada Tabel 4.

Total potensi penerimaan negara dari PBB dan PPN perkebunan sawit di Provinsi Jambi

Rp 2.916.966.486.273,45

Kontribusi terbesar dari potensi penerimaan pajak tersebut diperoleh dari PPN



Tabel 4 Penerimaan Negara dari Pajak Perkebunan Sawit Tahun 2020

Jenis Pajak	Nilai Pajak (Rp)	Persentase (%)
PBB	207.163.296.563,79	7,10
PPN	2.709.803.189.709,66	92,90
Total	***2.916.966.486.273,45***	***100,00***

Sumber: Hasil Olahan (2020)

Studi ini hanya menghitung potensi penerimaan PBB berdasarkan objek pajak areal produktif yaitu areal yang telah ditanami sawit. Objek pajak PBB lainnya sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 186/PMK.03/2019 Tentang Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan tidak dihitung. **Hal ini yang membuat potensi nilai penerimaan PBB masih rendah (*under-estimate*).**

1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Potensi penerimaan PBB perkebunan sawit Provinsi Jambi tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 5.

Total potensi penerimaan PBB perkebunan sawit di Provinsi Jambi ▶ **Rp 207.163.296.563,79** dengan nilai PBB per luasan yaitu **Rp 261.651,31 per hektare**

Kabupaten Muaro Jambi
Menjadi wilayah yang berkontribusi paling besar terhadap potensi penerimaan PBB perkebunan sawit Provinsi Jambi
27,24%

Kabupaten Sarolangun
Menjadi wilayah yang memiliki nilai PBB per luasan tertinggi
Rp 263.837,16 per hektare

Tabel 5 Potensi Penerimaan Negara dari Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Wilayah Kabupaten/Kota Tahun 2020

No.	Kabupaten	PBB (Rp)	PBB (Rp/ha)
1.	Batanghari	24.700.867.728,14	261.562,33
2.	Bungo	18.549.500.990,03	260.508,81
3.	Kerinci	816.393.954,54	259.139,01
4.	Merangin	12.703.489.198,55	263.086,56
5.	Muaro Jambi	56.428.759.429,51	260.912,38
6.	Sarolangun	14.755.884.232,73	263.837,16
7.	Tanjung Jabung Barat	36.920.370.775,68	262.577,72
8.	Tanjung Jabung Timur	22.074.507.678,07	259.211,78
9.	Tebo	20.196.590.858,03	262.178,51
10.	Jambi	16.931.718,52	263.498,79
11.	Sungaipenuh	-	-
	Total	*207.163.296.563,79**	*261.651,31***

Sumber: Hasil Olahan (2020)

Keterangan:

** Total PBB tahun 2020*

*** Rata-rata PBB per hektare 2020*

Pendugaan potensi penerimaan PBB perkebunan sawit berdasarkan areal produktif telah dilakukan di beberapa Provinsi di Indonesia. Soedomo et al. (2018) berhasil menghitung PBB Provinsi Kalimantan Barat yaitu Rp 197,64 miliar dengan nilai PBB per luasan sebesar Rp 178.016,67 per hektare. Rosalina et al. (2020) juga berhasil menduga potensi penerimaan PBB perkebunan sawit di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp 2,41 miliar dengan nilai PBB per luasan yaitu Rp 36.764,11 per hektare.

Maka, potensi penerimaan PBB perkebunan sawit Provinsi Jambi masih lebih besar dibandingkan Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Potensi penerimaan PPN dari produksi TBS perkebunan sawit di berdasarkan wilayah kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 6. Wilayah dengan potensi penerimaan PPN terbesar tahun 2020 adalah Kabupaten Muaro Jambi yaitu 601.467.745.488,78 atau 22,20 persen dari total potensi penerimaan PPN Provinsi Jambi.

Kabupaten Muaro Jambi

Menjadi wilayah dengan potensi penerimaan PPN terbesar tahun 2020

▼

601.467.745.488,78 atau 22,20%

dari total potensi penerimaan PPN Provinsi Jambi

Tabel 6 Potensi Penerimaan Negara dari Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2020

No.	Kabupaten	PPN (Rp)
1.	Batanghari	373.977.618.626,50
2.	Bungo	283.112.521.861,37
3.	Kerinci	11.608.935.841,55
4.	Merangin	198.045.852.717,66
5.	Muaro Jambi	601.467.745.488,78
6.	Sarolangun	196.727.907.389,66
7.	Tanjung Jabung Barat	524.979.173.119,35
8.	Tanjung Jabung Timur	193.409.816.533,50
9.	Tebo	326.187.211.041,87
10.	Jambi	286.407.089,40
11.	Sungaipenuh	-
	Total	***2.709.803.189.709,66***

Sumber: Hasil Olahan (2020)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sangat dipengaruhi oleh tingkat produktivitas perkebunan sawit dan harga TBS. Semakin tinggi produktivitas dan harga TBS maka potensi penerimaan negara dari PPN perkebunan sawit semakin besar (Rosalina *et al.* 2020).

3. Potensi, Target, dan Realisasi Pajak

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masuk kedalam lima sektor terbesar penyumbang pajak di Provinsi Jambi tahun 2020 dan 2019 (Kanwil DJPb Provinsi Jambi 2020). Besaran realisasi dan target pajak seluruh sektor untuk PBB dan PPN di Provinsi Jambi dapat dilihat pada Tabel 7.

Terdapat *gap* antara realisasi PBB dan PPN untuk seluruh sektor di Provinsi Jambi tahun 2020 dengan nilai yang ditargetkan. Realisasi PBB dan PPN untuk seluruh sektor masing–masing sebesar Rp 120,02 miliar dan Rp 1,96 triliun, lebih rendah dari yang ditargetkan. Bahkan, *gap* antara realisasi dan target dari seluruh sektor semakin lebar dibandingkan dengan nilai potensi (hanya) dari satu sektor yakni sektor sawit (Tabel 7).

Tabel 7 menunjukkan bahwa penggalian potensi perpajakan di Provinsi Jambi belum optimal. Menurut Kanwil DJPb Provinsi Jambi (2020), rendahnya kesadaran Wajib Pajak (WP) melakukan pembayaran pajak, rendahnya infrastruktur teknologi pendukung, rendahnya nilai tambah dalam usaha, sulitnya akses untuk mendatangi WP, kurangnya SDM, dan tingginya risiko dalam melakukan ekstensifikasi pajak termasuk ancaman pembunuhan dari pelaku usaha ketika disurvei, merupakan faktor penyebab belum optimalnya penggalian perpajakan di Provinsi Jambi.

Anaslisis *cash flow* Kanwil DJPb Provinsi Jambi (2020) menyebutkan bahwa selama periode 2018–2020, Jambi selalu menjadi Provinsi penerima subsidi, bukan donatur yang memberikan subsidi silang untuk Provinsi lain. Dengan demikian, luasnya perkebunan sawit dan kekayaan sumberdaya alam lainnya yang dimiliki Jambi belum berkontribusi optimal bagi penerimaan dan belanja negara.

Tabel 7 Perbandingan Potensi, Target, dan Realisasi Pajak di Provinsi Jambi Tahun 2020

Pajak	Potensi Sektor Sawit (Rp)	Target Seluruh Sektor (Rp)	Realisasi Seluruh Sektor (Rp)
PBB	207,16 miliar	174,10 miliar	120,02 miliar
PPN	2,70 triliun	1,99 triliun	1,96 triliun

Sumber: Hasil olahan (2020), Kanwil DJPb Provinsi Jambi (2020)

D. Pengusahaan Perkebunan Sawit

Secara garis besar, pengusahaan perkebunan sawit berdasarkan skala usaha di Indonesia terdiri atas perkebunan besar (swasta atau negara) dan perkebunan rakyat. Skala usaha perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan ditentukan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha.

1. Perkebunan Besar

Usaha perkebunan skala besar di Provinsi Jambi diidentifikasi berdasarkan kepemilikan Hak Guna Usaha yang diperoleh dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi tahun 2018. Sebab, keabsahan suatu usaha perkebunan skala besar pada tanah negara ditentukan oleh bukti kepemilikan HGU.

Jumlah pemegang HGU perkebunan sawit di Provinsi Jambi yang berhasil diidentifikasi yaitu 118 HGU dengan total luas 286.762,67 hektare. Wilayah dengan jumlah pemegang HGU terbanyak terdapat di Kabupaten Muaro Jambi (35 HGU) dan Kabupaten Batanghari (24 HGU). Jumlah dan luas HGU berdasarkan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jambi secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8 Jumlah Pemegang HGU Berdasarkan Wilayah Kabupaten Tahun 2018

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah HGU	Luas (ha)
1.	Batanghari	24	65.396,18
2.	Bungo	7	24.969,72
3.	Kerinci	1	3.081,61
4.	Merangin	3	11.185,07
5.	Muaro Jambi	35	67.428,23
6.	Sarolangun	12	36.865,08
7.	Tanjung Jabung Barat	14	36.072,01
8.	Tanjung Jabung Timur	13	17.327,84
9.	Tebo	9	24.436,91
10.	Jambi	-	-
11.	Sungaipenuh	-	-
	Total	***118***	***286.762,67***

Sumber: WALHI Jambi (2018)

a. Perkebunan Besar Swasta

Usaha perkebunan sawit skala besar di Provinsi Jambi didominasi oleh Perkebunan Besar Swasta (PBS). Dari 118 HGU yang berhasil diidentifikasi, 113 diantaranya merupakan kategori PBS. Total luas area HGU yang termasuk dalam kategori PBS di Provinsi Jambi yaitu 260.603,68 hektare atau 90,88 persen dari keseluruhan total luas HGU yang teridentifikasi. Pemegang HGU perkebunan sawit dengan luasan terbesar adalah PT. Asiatic Persada yaitu 20.670,73 hektare. Secara lebih rinci daftar pemegang HGU perkebunan sawit di Provinsi Jambi dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9 Daftar Pemegang HGU Berdasarkan Lokasi Kabupaten dan Luas

No	Pemegang HGU	Kabupaten	Luas (ha)
1	Koperasi Bina Bersama	Muaro Jambi	269,93
2	Koperasi Indah Jaya	Muaro Jambi	80,90
3	Koperasi Mekar Jaya	Muaro Jambi	895,41
4	Koperasi Olak Gedang Melako Intan	Tebo	639,69
5	Koperasi Perkebunan Maju Bersama	Tanjung Jabung Barat	120,81
6	Koperasi Puding Sejahtera	Muaro Jambi	828,01
7	Koperasi Sinar Mulia Rezeki	Sarolangun	970,95
8	Koperasi Tiga Sekawan	Batanghari	603,79
9	KUD Wahana Jaya	Muaro Jambi	1.591,98
10	PT. Agrotamex Sumindo Abadi	Muaro Jambi	198,49
11	PT. Abdilla Kesuma	Tanjung Jabung Timur	191,65
12	PT. Adimulia Palmo Lestari	Batanghari	3.227,50
13	PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa	Sarolangun	2.135,90
14	PT. Agro Makmur Abadi Sejahtera	Tanjung Jabung Timur	96,12
15	PT. Agro Tumbuh Gemilang Abadi	Tanjung Jabung Timur	1.231,60
16	PT. Agrotamex Sumindoabadi	Tanjung Jabung Timur	334,07
17	PT. Agrowiyana	Tanjung Jabung Barat	3.901,04
18	PT. Aneka Multikerta	Tanjung Jabung Barat	507,22
19	PT. Aneka Pura Multikerta	Muaro Jambi	723,52
20	PT. Asiatic Persada	Batanghari	20.670,73
21	PT. Bahari Gembira Ria	Muaro Jambi	3.046,73
22	PT. Bara Eka Prima	Muaro Jambi	572,04
23	PT. Bintang Selatan Agro	Tebo	306,91
24	PT. Borneo Karya Cipta	Muaro Jambi	992,04
25	PT. Brahma Bina Bakti	Batanghari	241,86
		Muaro Jambi	7.344,18
26	PT. Bukit Barisan Indah Prima	Muaro Jambi	1.740,64
		Tanjung Jabung Timur	1.506,05
27	PT. Bukit Bintang Sawit	Muaro Jambi	212,16
28	PT. Bukit Kausar	Tanjung Jabung Barat	5.306,35
29	PT. Bukit Tambi	Tanjung Jabung Barat	282,04

30	PT. Cahaya Mitra Sawit Sarolangun	Sarolangun	346,20
31	PT. Cakrawala Agro Persada	Muaro Jambi	159,35
32	PT. Cipta Prasasti Lestari	Batanghari	429,08
33	PT. Citra Koprasindo Tani	Tanjung Jabung Barat	2.147,36
34	PT. Citra Sawit Harum	Bungo	5.279,24
35	PT. Citramulia Manunggal	Batanghari	1.914,25
36	PT. Dasa Anugrah Sejati	Tanjung Jabung Barat	8.991,89
37	PT. Dhamasraya Palma Sejahtera	Batanghari	1.097,13
38	PT. Era Mitra Agro Lestari	Sarolangun	10.100,42
39	PT. Erasakti Wiraforestama	Muaro Jambi	6.314,99
		Tanjung Jabung Timur	585,46
40	PT. Fajar Pematang Indah Lestari	Muaro Jambi	1.100,11
41	PT. Felda Indo Mulia	Tanjung Jabung Barat	587,00
42	PT. Graha Cipta Bangko Jaya	Merangin	410,49
		Sarolangun	298,01
43	PT. Hazrin Nurdin Nusaphala	Tanjung Jabung Timur	468,27
44	PT. Humusindo Makmur Sejati	Batanghari	63,72
45	PT. Hutan Alam Lestari	Batanghari	732,34
46	PT. Indo Kebun Unggul	Batanghari	511,97
47	PT. Indonusa Agromulia	Tanjung Jabung Timur	1.797,10
48	PT. Inti Indosawit Subur	Batanghari	1.266,25
		Tanjung Jabung Barat	4.559,34
49	PT. Jambi Agro Wiyana	Sarolangun	11.847,69
50	PT. Jambi Batanghari Plantation	Muaro Jambi	1.952,23
51	PT. Jamika Raya	Bungo	4.773,15
52	PT. Kaswari Unggul	Tanjung Jabung Timur	3.215,30
53	PT. Kedaton Mulia Primas	Batanghari	1.231,88
		Sarolangun	670,72
54	PT. Ketaling Utama Sejahtera	Muaro Jambi	348,72
55	PT. Kharisma Kemingking	Muaro Jambi	1.545,08
56	PT. Kresna Duta Agroindo	Merangin	10.556,26
		Sarolangun	1.044,71
57	PT. Kumala Jambi Perkasa	Tanjung Jabung Barat	522,32
58	PT. Kurnia Sawit Yanto Bersaudara	Muaro Jambi	1.028,56
59	PT. Ladang Sawit Sejahtera	Tanjung Jabung Timur	242,06
60	PT. Lubuk Lancang Kuning	Sarolangun	202,04
61	PT. Megasawindo Perkasa	Bungo	4.080,87
62	PT. Mekar Agro Sawit	Batanghari	386,43
63	PT. Mendahara Agro Jaya Industri	Tanjung Jabung Timur	3.235,20
64	PT. Menderang Planta Karpusa	Tanjung Jabung Timur	2.394,69
65	PT. Metro Yakin Jaya	Tanjung Jabung Timur	2.030,29

66	PT. Muaro Kahuripan Indonesia	Muaro Jambi	1.008,68
67	PT. Palma Sukses Abadi	Batanghari	804,67
68	PT. Persada Alam Hijau	Tebo	942,97
69	PT. Persada Harapan Kehidupan	Tebo	408,51
70	PT. Petaling Bungo Gading	Muaro Jambi	492,44
71	PT. Petaling Mandraguna	Batanghari	761,39
		Muaro Jambi	3.184,74
72	PT. PP Bajabang Indonesia	Tebo	1.475,29
73	PT. Pratama Agro Sawit	Batanghari	2.328,93
74	PT. Pratama Sawit Mandiri	Batanghari	289,65
75	PT. Prima Mas Lestari	Bungo	2.785,61
76	PT. Produk Sawitindo Jambi	Tanjung Jabung Barat	1.286,56
77	PT. Puri Hijau Lestari	Muaro Jambi	3.274,64
78	PT. Putra Muda Brothers	Batanghari	965,44
79	PT. Ratna Seruni	Tanjung Jabung Barat	480,32
80	PT. Rickim Mas Jaya Sakti	Muaro Jambi	2.561,07
81	PT. Ricky Kurniawan Kertapersada	Muaro Jambi	3.817,62
82	PT. Rigunas Agri Utama	Tebo	5.108,57
83	PT. Rudi Agung Laksana	Tanjung Jabung Barat	2.022,25
84	PT. Sari Aditya Loka	Sarolangun	5.404,86
85	PT. Satya Kisma Usaha	Bungo	1.747,48
		Tebo	1.388,54
86	PT. Sawit Desa Makmur	Batanghari	13.567,53
87	PT. Sawit Harum Makmur	Bungo	2.483,90
88	PT. Sawit Jambi Lestari	Batanghari	2.488,39
89	PT. Sawit Mas Plantation	Muaro Jambi	1.176,55
90	PT. Sinar Agung Persada Mas	Sarolangun	476,61
91	PT. Sukses Maju Abadi	Bungo	3.819,47
92	PT. Sumbertama Nusa Pertiwi	Muaro Jambi	7.240,97
93	PT. Sungai Bahar Pasifik	Muaro Jambi	2.524,84
94	PT. Sungai Bahar Pasifik Utama	Batanghari	739,27
		Muaro Jambi	1.221,25
95	PT. Surya Kencana Nusantara	Muaro Jambi	383,71
96	PT. Taman Sari Agro Lestari	Muaro Jambi	75,87
97	PT. Tebo Indah	Tebo	7.032,00
98	PT. Trimitra Lestari	Tanjung Jabung Barat	5.357,53
99	PT. Tunjuk Langit Sejahtera	Batanghari	2.716,72
100	PT. Velindo Aneka Tani	Batanghari	1.948,58
		Muaro Jambi	1.643,50
101	PT. Wana Seponjen Indah	Muaro Jambi	1.709,98
102	PT. Kresna Duta Agroindo	Merangin	218,32
		Total	***260.603,68***

Sumber: WALHI Jambi (2018)

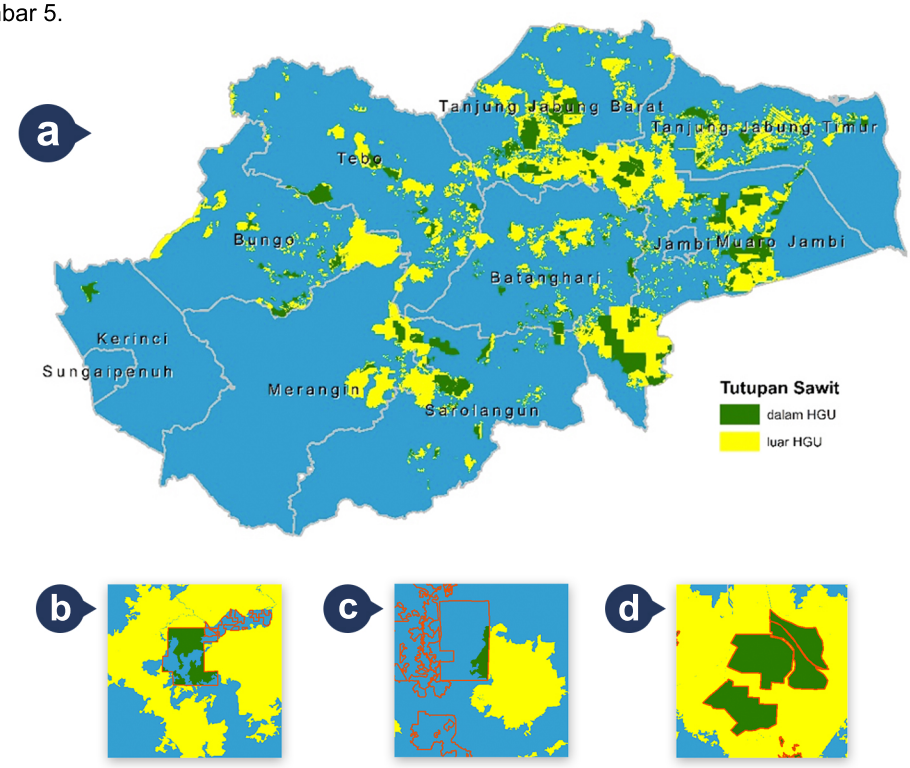
Hasil *overlay* tutupan sawit dan areal HGU menunjukkan bahwa terdapat tutupan sawit skala besar yang berada di luar areal HGU. Tutupan sawit yang berada di luar areal HGU secara keseluruhan memiliki luas yang lebih besar dibandingkan dengan tutupan sawit di dalam areal HGU. Secara lebih rinci luas tutupan sawit di dalam dan di luar HGU dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10 Perbandingan Potensi, Target, dan Realisasi Pajak di Provinsi Jambi Tahun 2020

Tutupan Sawit	Luas (ha)	Persentase (%)
Dalam HGU	192,789.33	24.94
Luar HGU	580,293.46	75.06
Total	***773,082.79***	***100.00***

Sumber: Hasil olahan (2019)

Tutupan sawit yang berada diluar HGU di Provinsi Jambi memiliki dua kategori yaitu mudah teridentifikasi dan sulit teridentifikasi. Kategori mudah teridentifikasi adalah tutupan sawit yang berada satu hamparan dan menyatu dengan tutupan sawit HGU serta tidak menyatu dengan tutupan sawit HGU lainnya. Sedangkan kategori yang sulit teridentifikasi adalah tutupan sawit yang saling tumpang tindih dengan lebih dari satu areal HGU. Sebaran tutupan sawit di luar areal HGU dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5 (a) Sebaran Tutupan Sawit Berdasarkan Areal HGU; (b) PT. Inti Indosawit Subur; (c) PT. Sawit Jambi Lestari; (d) Gabungan Beberapa HGU

b. Perkebunan Besar Negara

Perkebunan Besar Negara (PBN) di Provinsi Jambi dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero).

Areal HGU PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) terdapat di lima Kabupaten

TOTAL LUAS
26.158,98 hektare

Tabel 11 Luas HGU PBN di Provinsi Jambi

Pemegang Hak	Kabupaten	Luas (ha)
PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero)	Batanghari	6.408,68
	Kerinci	3.081,61
	Muaro Jambi	6.167,29
	Sarolangun	3.366,96
	Tebo	7.134,44
	Total	***26.158,98***

Sumber: WALHI Jambi (2018)

PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) cenderung memiliki tutupan sawit diluar HGU yang minim. Tutupan sawit PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) yang berada di luar areal HGU dengan kategori sulit teridentifikasi hanya terdapat di Kabupaten Batanghari. Kondisi tutupan sawit yang berada diluar areal HGU PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) di Kabupaten Batanghari saling tumpang tindih dengan HGU PT. Asiatic Persada.

2. Perkebunan Rakyat (Perkebunan Mandiri)

Hasil identifikasi perkebunan rakyat/mandiri yang dilakukan dalam studi ini didasarkan pada kriteria luas kurang dari 25 hektare menggunakan data tutupan sawit hasil interpretasi visual. Total perkebunan rakyat yang berhasil diidentifikasi tahun 2019 adalah 16.914,95 hektare. Secara lebih rinci luas perkebunan mandiri berdasarkan wilayah kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12 Luas Perkebunan Rakyat/Mandiri di Provinsi Jambi Tahun 2019

Kabupaten/Kota	Perkebunan Rakyat (ha)
Batanghari	2.375,96
Bungo	510,21
Merangin	365,49
Muaro Jambi	4.833,26
Sarolangun	520,86
Tanjung Jabung Barat	2.115,01

Tanjung Jabung Timur	4.545,71
Tebo	1.611,11
Jambi	37,35
Sungaipenuh	-
Total	***16.914,95***

Sumber: Hasil olahan (2019)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, perusaahan perkebunan dengan luas 250 hektare atau lebih memiliki kewajiban untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20 persen dari luas areal IUP-B atau IUP. Berdasarkan asumsi tersebut maka setidaknya terdapat minimal 154.616,56 hektare perkebunan rakyat atau 20 persen dari total tutupan sawit perusahaan berskala besar.

3. Kesenjangan Data

Status pengusahaan perkebunan menjadi penting dalam perhitungan pajak. Rosalina *et al.* (2020) menyebutkan bahwa kesalahan dalam menginformasikan status pengusahaan perkebunan berpotensi menimbulkan kegagalan dalam identifikasi obyek pajak maupun subyek pajak. Sehingga akan berdampak pada semakin tingginya nilai kehilangan penerimaan.

Pada Tabel 13 menunjukkan kesenjangan data pengusahaan perkebunan sawit di Provinsi Jambi tahun 2019 dari berbagai sumber. Data yang dipublikasikan oleh Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Jambi dan Kantor Wilayah Ditjen Pembendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Jambi menyebutkan luasan perkebunan besar (total luas area PBS dan PBN) di Jambi yakni 263.726 hektare. Angka ini hampir sama dengan HGU sawit di Jambi seluas 286.762,67 hektare (Tabel 8).

Sementara, hasil konsolidasi data WALHI Jambi dengan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi menyebutkan bahwa sampai tahun 2018 terdapat 1.368.000 hektare izin lokasi, 248.000 hektare HGU, dan 962.000 hektare IUP untuk perusahaan perkebunan sawit di Jambi (WALHI Jambi 2019). Dengan demikian, merujuk pada publikasi resmi Disbun Jambi, Kanwil DJPb Jambi, dan Kementerian Pertanian tahun 2019, banyak perusahaan sawit di Jambi secara eksisting beroperasi tanpa HGU namun tidak dikategorikan sebagai perkebunan besar.

Tabel 13 Kesenjangan Data Pengusahaan Perkebunan di Provinsi Jambi Tahun 2019

Pengusahaan Perkebunan	Hasil Studi (Ha)	Dinas Perkebunan Provinsi & Kantor Wilayah Ditjen Pembendaharaan Provinsi (Ha)	Kementerian Pertanian (Ha)	BPS (Ha)
Perkebunan Besar Swasta		239.917		362.662
Perkebunan Besar Negara		23.809		20.430
Perkebunan Rakyat		467.573		682.175
Total	***792.145,79***	***791.025***	***1.134.640***	***1.065.267***

Sumber: Hasil olahan (2019), Dinas Perkebunan Provinsi Jambi (2019), Kantor Wilayah Ditjen Pembendaharaan Provinsi Jambi (2020), Kementerian Pertanian (2019), BPS (2019)

4. Risiko Lingkungan, Sosial, dan Tatakelola Pembangunan Sawit

Perluasan perkebunan dan pabrik kelapa sawit akan memberikan dampak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Studi ini mengidentifikasi dan menganalisis dampak risiko lingkungan, sosial, dan tatakelola (LST) pada budidaya dan pengolahan kelapa sawit. Uraian atas dampak risiko LST dilakukan berdasarkan hasil pemantauan perkebunan sawit di lahan gambut yaitu kasus PT Erasakti Wiraforestama.



PT. Erasakti Wiraforestama

Nomor/Tanggal Akta	01 / 01 Agustus 2019
Notaris	Nova Herwawati, SH
Nomor SP Data	AHU-0046465.AH.01.02.Tahun 2019
Jenis Perseroan	PMDN Non Fasilitas
NPWP Perseoran	01.654.687.1-331.000
Alamat	Jl. WR. Supratman No.75, Kota Jambi

Gambar 6 Profile Perusahaan PT. Erasakti Wiraforestama (Sumber: Ditjen AHU diakses 9 Juli 2021)

a. Temuan Lapangan

Hasil pemantauan yang dilakukan di Desa Rukam, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi, beberapa temuan yang terjadi sebagai berikut:

No	Aspek Sosial
1.	Berkurangnya mata pencaharian masyarakat Desa Rukam dibidang usaha perikanan. Sebab, wilayah tanggapan ikan seperti danau dan lopak sudah beralih fungsi menjadi kebun sawit, sungai–sungai dicemari oleh zat kimia dari pupuk sawit yang dibuang melalui kanal-kanal yang dibangun oleh perusahaan[1].
2.	Masyarakat Desa Rukam tidak bisa lagi memanfaatkan sawah karena perusahaan membangun tanggul pembatas setinggi ±8 meter antara perkebunan sawit dengan areal sawah/perladangan masyarakat, akibatnya pada musim kemarau areal tersebut menjadi kering dan musim hujan mengalami kebanjiran[2].

1 https://www.dw.com/id/ironi-desa-rukam-kampung-nelayan-tanpa-air-dan-ikan/a-50795335-0

2 https://www.mongabay.co.id/2020/10/07/cerita-warga-desa-rukam-kala-perusahaan-sawit-datang/

3.	Oleh karena berkurangnya mata pencaharian dibidang usaha perikanan dan pertanian, sehingga banyak masyarakat menjadi Buruh Harian Lepas (BHL) di perusahaan sebagai pembersih lahan sawit dan pemupukan.
4.	Umumnya, masyarakat Desa Rukam banyak mengalami gangguan kesehatan, seperti diare dan gatal-gatal yang dipicu oleh buruknya kualitas air yang dikonsumsi. Sebab, sumber air utama masyarakat yang berasal dari sungai Batanghari atau sumur, tercemar oleh zat kimia dari pupuk sawit yang dibuang ke kanal menuju sungai dan areal resapan wilayah permukiman masyarakat. Hal lainnya, oleh karena kurang terjaminnya kesehatan dan keselamatan kerja, masyarakat yang menjadi BHL di perusahaan seringkali mengalami ISPA.

No	Aspek Tatakelola Lingkungan
1.	Perkebunan sawit PT. EWF banyak membangun kanal-kanal sekunder dan primer, sebab konsesinya berada di wilayah gambut dengan kedalaman rata-rata 2-5 meter. Hal ini berdampak terhadap pengeringan gambut dan peristiwa kebakaran hutan dan lahan[3].
2.	Perkebunan sawit PT. EWF melakukan monopoli air dengan menggunakan mesim pompa air berskala besar untuk mengatur air dan debit air kebun dan membuang air tersebut ke areal pertanian dan permukiman warga[4].
3.	Desa Rukam merupakan wilayah gambut yang berada di pinggiran Sungai Batanghari. Menurut masyarakat, setiap tahun di desa Rukam terjadi banjir, intensitas banjir yang terjadi tergantung pada intensitas hujan yang terjadi di wilayah hulu sampai ke hilir sungai Batanghari. Sebelum adanya tanggul perusahaan, banjir besar biasanya terjadi 5 tahun sekali, namun pada kondisi saat ini hampir setiap tahun terjadi banjir besar. Air luapan sungai Batanghari biasanya menyebar melalui plimer (kanal–kanal besar yang di buat pemerintah tahun 1982 yang bertujuan agar luapan air sungai Batanghari menyebar kedalam plimer), namun plimer tersebut sekarang telah ditutup oleh tanggul perusahaan. Sehingga, air luapan sungai Batanghari tertahan oleh tanggul yang hanya berjarak 200 meter dari pemukiman masyarakat.

3 https://www.walhi-jambi.com/2015/10/siaran-pers-penyelidikan-polda-jambi-di.html

4 https://www.walhi-jambi.com/2019/05/press-rilis-temuan-pelanggaran.html

4.	Air menjadi yang paling terdampak karena aktivitas pembangunan tanggul. Ketika musim penghujan, air yang dipompa keluar dari dalam tanggul menuju sungai Batang hari mengandung zat kimia berbahaya seperti pupuk kelapa sawit, pestisida, dan limbah pengolahan kelapa sawit. Padahal air tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan mandi, cuci, dan kakus (MCK). Sementara itu, saat musim kemarau, air sumur berkarat dan berbau menyengat, sehingga masyarakat membeli air galon isi ulang untuk dikonsumsi sehari–hari.

Kondisi Desa Rukam

7 titik Pompa Air
2 Pompa Air mengapit Desa Rukam

Pompa Air bertujuan untuk membuang air dari dalam lahan dan dibuang keluar melalui kanal di pinggir tanggul



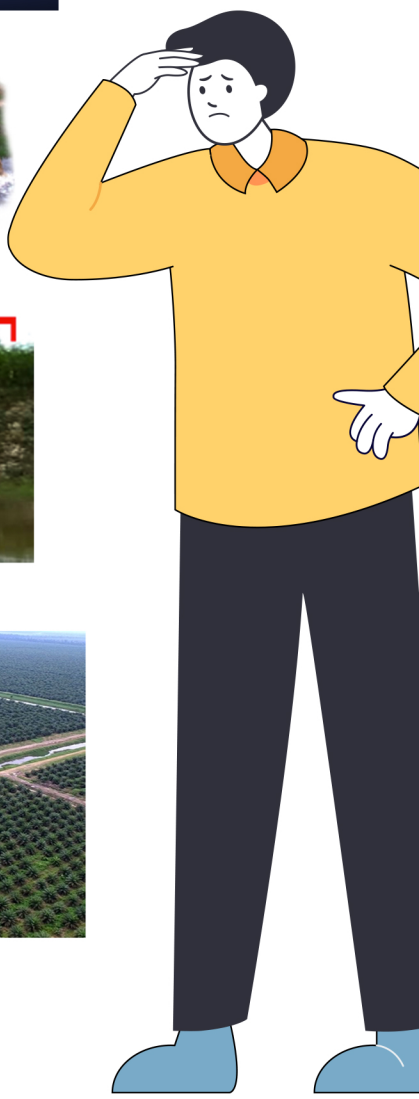
Panjang Tanggul 9 s/d 11 Km

Tinggi Tanggul 8 Meter










Pompa Air 12
- Pompa air terletak ± 2 Km setelah Desa Rukam
- Pencemaran Air
- Pembuangan air ini selain berdampak di Desa Rukam, juga berdampak ke Desa - desa lainnya
Lahan Perkebunan PT. EWF
- Dahulu adalah kawasan Rawa Dalam
- Tempat masyarakat mencari kayu
- Salah Satu tempat masyarakat mencari ikan
Desa Rukam
130 m
Area ini sebelum didirikan tanggul dan kanal adalah lahan persawahan masyarakat. namun tidak bisa lagi digunakan karena kondisi lahan yang tidak bisa ditanam lagi.
Saat musim hujan di area ini banjir, dan disaat musim kemarau area ini kering dikarenakan air tanah yang turun ke aliran kanal perusahaan.







Gambar 7 Kondisi Desa Rukam, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi Pasca Kehadiran PT EWF (Sumber: WALHI Jambi 2018)

b. Penerimaan Pajak

Hasil identifikasi objek pajak menggunakan citra SPOT 6 menunjukkan bahwa area HGU PT. Erasakti Wiraforestama (PT. EWF) masih didominasi oleh areal produktif. Luas areal produktif PT. EWF adalah 4,308.90 hektare (75.78%) yang terdiri atas TBM, TM dan TTM. Luas objek pajak PT. Erasakti Wiraforestama secara rinci dapat dilihat pada Tabel 14.

No.	Objek Pajak	Luas (ha)	Persentase (%)
1.	Areal Produktif	4,308.90	75.78
	TBM	*4.292,01*	
	TM	*13,18*	
	TTM	*3,71*	
2.	Areal Belum Produktif	1.074,91	18.90
3.	Areal Tidak Produktif		-
4.	Areal Pengaman	294,93	5.19
5.	Areal Emplasemen	7,22	0.13
	Total	***5.685,96***	***100.00***

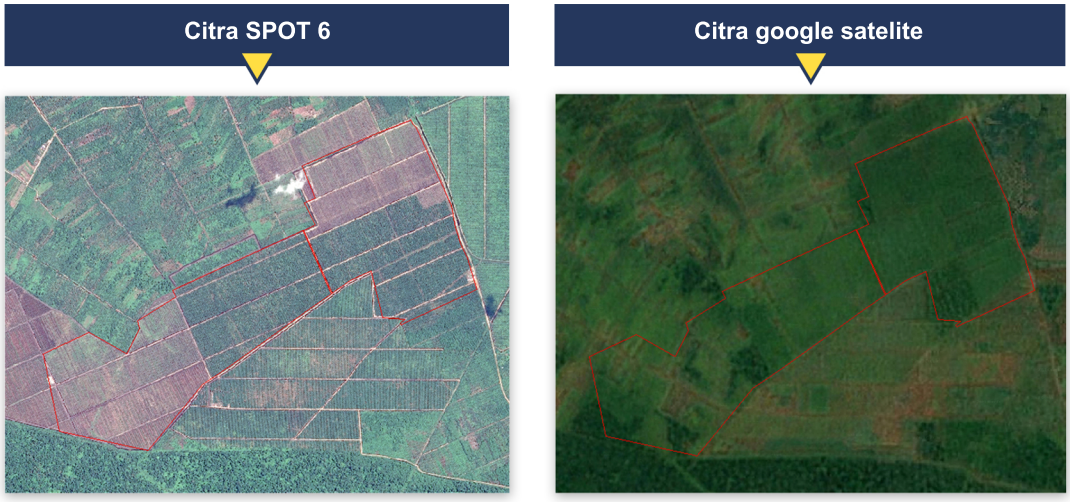
Tabel 14 Luas Area Objek Pajak PT. Erasakti Wiraforestama Tahun 2020

Potensi penerimaan pajak PT. Erasakti Wiraforestama yang berhasil dihitung secara keseluruhan yaitu Rp. 290,809,436.19. Potensi penerimaan PBB sebesar Rp 221,200,350.27 (76,06%). Sedangkan potensi penerimaan PPN sebesar Rp 69.609.085,92 (98.11%).

Tabel 15 Potensi Penerimaan Pajak PT. Erasakti Wiraforestama Tahun 2020

Pemegang Hak	Jenis Pajak	Nilai Pajak (Rp)	Persentase (%)
PT. Erasakti Wiraforestama	PBB	221.200.350,27	76,06
	PPN	69.609.085,92	23,94
Total		*290.809.436,19*	*100.00*

Sumber: Hasil olahan (2020)

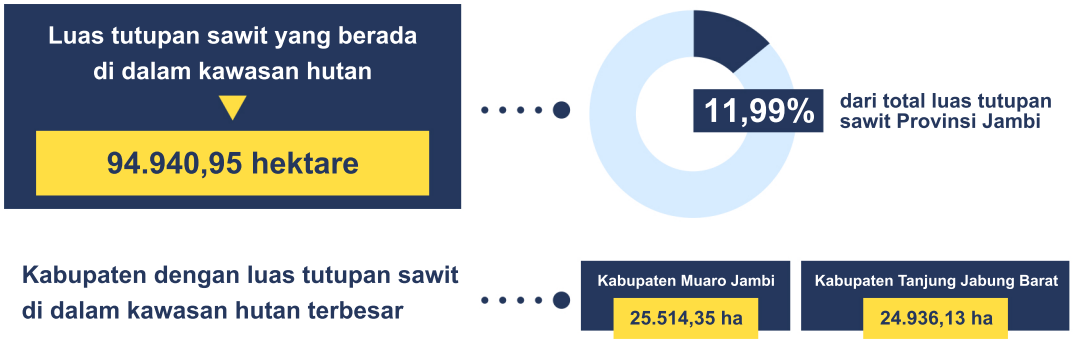


Gambar 8 Perbedaan Kualitas Citra yang digunakan dalam Proses Interpretasi Visual

E. Sawit dalam Kawasan Hutan

1. Tutupan Sawit dalam Kawasan

Hasil *overlay* tutupan sawit dan kawasan hutan menunjukkan bahwa masih terdapat tutupan sawit yang berada di dalam kawasan hutan.



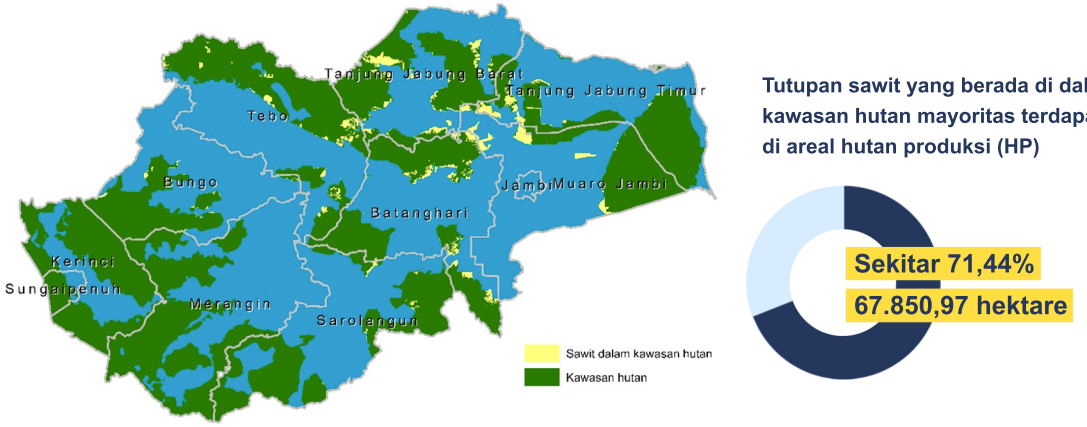
Luas tutupan sawit yang berada di dalam kawasan hutan yaitu 94.940,95 hektare atau sekitar 11,99 persen dari total luas tutupan sawit Provinsi Jambi. Kabupaten dengan luas tutupan sawit di dalam kawasan hutan terbesar yaitu Kabupaten Muaro Jambi (25.514,35 ha) dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (24.936,13 ha).

Tabel 16 Luas Tutupan Sawit dalam Kawasan Hutan Tahun 2019

No	Kabupaten / Kota	Kawasan Hutan (ha)					
		HL	HP	HPK	HPT	KK	Total
1	Batanghari		5.948,30	62,11	6.817,97	2.483,13	15.311,50
2	Bungo		1.804,39	1.000,18			2.804,57
3	Kerinci		1,29				1,29
4	Merangin		25,79				25,79
5	Muaro Jambi		18.277,69	5.811,13	1.263,32	162,21	25.514,35
6	Sarolangun		2.459,47		68,99	137,40	2.665,86
7	Tanjung Jabung Barat	3.013,87	19.750,38	0,17	1.492,63	679,08	24.936,13
8	Tanjung Jabung Timur	212,23	7.643,43	645,97		372,98	8.874,61
9	Tebo	49,96	11.940,22		2.789,40	27,26	14.806,83
	Total	***3.276,05***	***67.850,97***	***7.519,55***	***12.432,31***	***3.862,06***	***94.940,95***

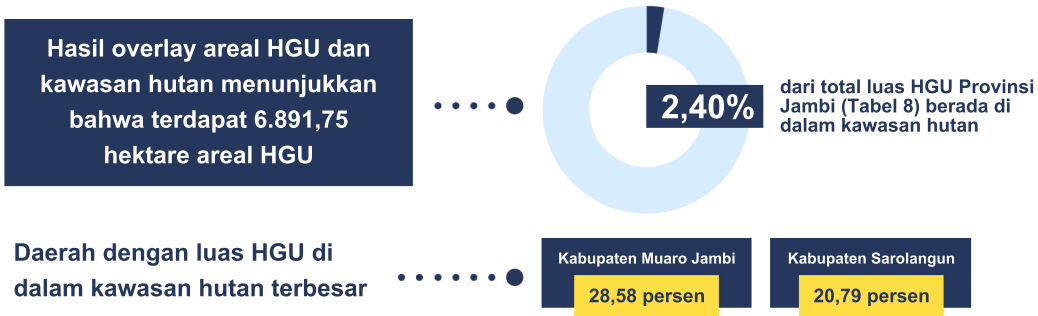
Sumber: Hasil Olahan (2019)

Berdasarkan klasifikasi fungsi kawasan hutan, tutupan sawit yang berada di dalam kawasan hutan mayoritas terdapat di areal hutan produksi (HP). Hasil klasifikasi menunjukkan bahwa 67.850,97 hektare atau sekitar 71,44 persen luas tutupan sawit tersebut berada di areal HP. Luas dan sebaran tutupan sawit yang terdapat di dalam kawasan hutan di Provinsi Jambi dapat dilihat pada Tabel 16 dan Gambar 9.



Gambar 9 Sebaran Tutupan Sawit yang berada di dalam Kawasan Hutan

2. Areal HGU dalam Kawasan



Hasil *overlay* areal HGU dan kawasan hutan menunjukkan bahwa terdapat 6.891,75 hektare areal HGU atau 2,40 persen dari total luas HGU Provinsi Jambi (Tabel 8) berada di dalam kawasan hutan. Daerah dengan luas HGU di dalam kawasan hutan terbesar yaitu Kabupaten Muaro Jambi (28,58 persen) dan Kabupaten Sarolangun (20,79 persen). Luas HGU di dalam kawasan hutan berdasarkan wilayah kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 17.

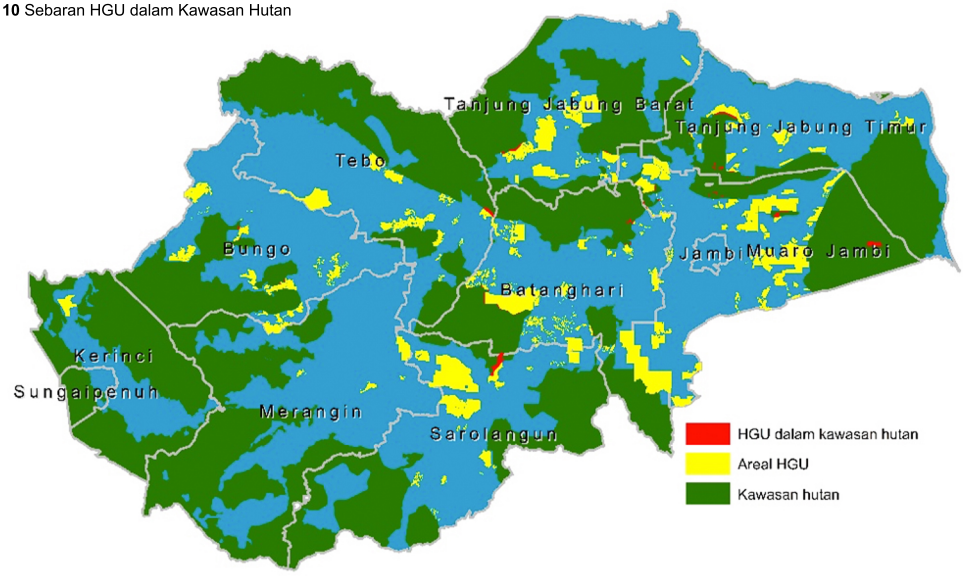
Tabel 17 Luas HGU dalam Kawasan Hutan Tahun 2018

No	Kabupaten / Kota	Kawasan Hutan (ha)					
		HL	HP	HPK	HPT	KK	Total
1	Batanghari		818,04		14,99	44,36	877,38
2	Bungo		104,53	146,18			250,71
3	Muaro Jambi	1.008,68	780,26	145,59	34,57	0,57	1.969,67
4	Sarolangun		1.433,42				1.433,42
5	Tanjung Jabung Barat		188,92		501,96	0,03	690,92
6	Tanjung Jabung Timur		1.027,49				1.027,49
7	Tebo		642,16				642,16
	Total	*1.008,68*	*4.994,82*	*291,77*	*551,52*	*44,96*	*6.891,75*

Sumber: Hasil Olahan (2018)

Hasil klasifikasi HGU perkebunan sawit di dalam kawasan hutan berdasarkan fungsi kawasan hutan menunjukkan bahwa areal HGU tersebut tersebar di lima fungsi kawasan yakni hutan lindung (HL), hutan produksi (HP), hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), hutan produksi terbatas (HPT), dan kawasan konservasi (KK). Luas HGU yang terdapat di dalam HL yaitu 1.008,68 hektare atau 14,64 persen dari total luas HGU di dalam kawasan hutan. Area HGU di dalam HP, HPK, HPT, dan KK masing-masing memiliki luas yaitu 4.994,82 hektare, 291,77 hektare, 551,52 hektare, dan 44,96 hektare.

Gambar 10 Sebaran HGU dalam Kawasan Hutan



Klasifikasi berdasarkan pemegang HGU juga dilakukan untuk mengetahui perusahaan yang memiliki perkebunan sawit di dalam kawasan hutan. Hasil klasifikasi menunjukkan bahwa terdapat 40 pemegang hak yang memiliki areal di dalam Kawasan hutan. Pemegang HGU yang memiliki luas areal di dalam Kawasan hutan terbesar yaitu PT. Era Mitra Agro Lestari (1.571,77 hektare) yang berada pada hutan produksi.

Tabel 18 Daftar HGU di dalam Kawasan Hutan Tahun 2018

No	Pemegang HGU	Kawasan Hutan (ha)					
		HL	HP	HPK	HPT	KK	Total
1	Koperasi Mekar Jaya		6,70				6,70
2	Koperasi Olak Gedang Melako Intan		175,62				175,62
3	PT. Adimulia Palmo Lestari	1.008,68	118,06				118,06
4	PT. Aneka Multikerta		6,60				6,60
5	PT. Asiatic Persada				11,96		11,96
6	PT. Bintang Selatan Agro		0,31				0,31
7	PT. Brahma Bina Bakti		570,35	119,91			690,26
8	PT. Bukit Barisan Indah Prima			0,31			0,31
9	PT. Bukit Kausar		41,63		501,96		543,60
10	PT. Cipta Prasasti Lestari		226,39				226,39
11	PT. Citra Koprasindo Tani		0,97	5,37		0,03	6,38
12	PT. Citra Sawit Harum		65,22				65,22
13	PT. Citramulia Manunggal		0,00				0,00
14	PT. Era Mitra Agro Lestari		1.571,77				1.571,77
15	PT. Humusindo Makmur Sejati					6,79	6,79
16	PT. Inti Indosawit Subur				3,02		3,02
17	PT. Kaswari Unggul		94,90				94,90

18	PT. Ketaling Utama Sejahtera			19,99	8,67		28,66
19	PT. Ladang Sawit Sejahtera		49,77				49,77
20	PT. Lubuk Lancang Kuning		0,01				0,01
21	PT. Mendahara Agro Jaya Industri		603,31				603,31
22	PT. Muaro Kahuripan Indonesia	1.008,68					1.008,68
23	PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero)		6,79				6,79
24	PT. Persada Alam Hijau		410,46				410,46
25	PT. PP Bajabang Indonesia		0,09				0,09
26	PT. Pratama Sawit Mandiri		53,74				53,74
27	PT. Puri Hijau Lestari		153,68				153,68
28	PT. Rickim Mas Jaya Sakti		1,89				1,89
29	PT. Ricky Kurniawan Kertapersada		338,52		24,73		363,24
30	PT. Rigunas Agri Utama		35,23				35,23
31	PT. Rudi Agung Laksana		103,39				103,39
32	PT. Satya Kisma Usaha		50,46	146,18			196,64
33	PT. Sawit Desa Makmur		281,28				281,28
34	PT. Sawit Harum Makmur		2,63				2,63
35	PT. Sungai Bahar Pasifik Utama					0,00	0,00
36	PT. Tebo Indah		6,66				6,66
37	PT. Trimitra Lestari		18,41				18,41
38	PT. Tunjuk Langit Sejahtera					37,56	37,56
39	PT. Wana Seponjen Indah				1,17	0,57	1,74
	Total	***1.008,68***	***4.994,82***	***291,77***	***551,52***	***44,96***	***6.891,75***

Sumber: Hasil Olahan (2018)

F. Sawit pada Lahan Gambut

1. Sawit pada Lahan Gambut

Salah satu isu penting perkebunan sawit selain deforestasi adalah penggunaan lahan gambut sebagai areal perkebunan. Pembukaan perkebunan sawit di lahan gambut dinilai memperburuk dampak perubahan iklim dan menghambat upaya mitigasi perubahan iklim.

Provinsi Jambi merupakan salah satu daerah dengan lahan gambut terbesar di Indonesia. Di satu sisi, Provinsi Jambi juga merupakan salah satu daerah dengan luas perkebunan sawit terbesar di Indonesia. Potensi terjadinya pembukaan perkebunan sawit pada lahan gambut di Provinsi Jambi masih sangat besar.

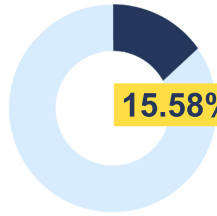
Tabel 19 Luas Tutupan Sawit Berdasarkan Jenis Lahan Tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	Jenis Lahan (ha)		
		Mineral	Gambut	Total
1	Batanghari	94,435.87		94,435.87
2	Bungo	71,204.89		71,204.89
3	Kerinci	3,150.41		3,150.41
4	Merangin	45,887.81	2,398.53	48,286.35
5	Muaro Jambi	139,491.64	76,783.11	216,274.75

6	Sarolangun	42,091.69	13,836.31	55,928.00
7	Tanjung Jabung Barat	123,147.69	17,459.71	140,607.40
8	Tanjung Jabung Timur	48,457.99	36,702.13	85,160.12
9	Tebo	77,033.74		77,033.74
10	Jambi	62.75	1.51	64.26
11	Sungaipenuh			
	Total	***644,964.49***	***147,181.30***	***792,145.79***

Sumber: Hasil olahan (2019)

Tutupan sawit yang berada pada lahan gambut



15.58% dari total tutupan sawit yang berhasil diidentifikasi

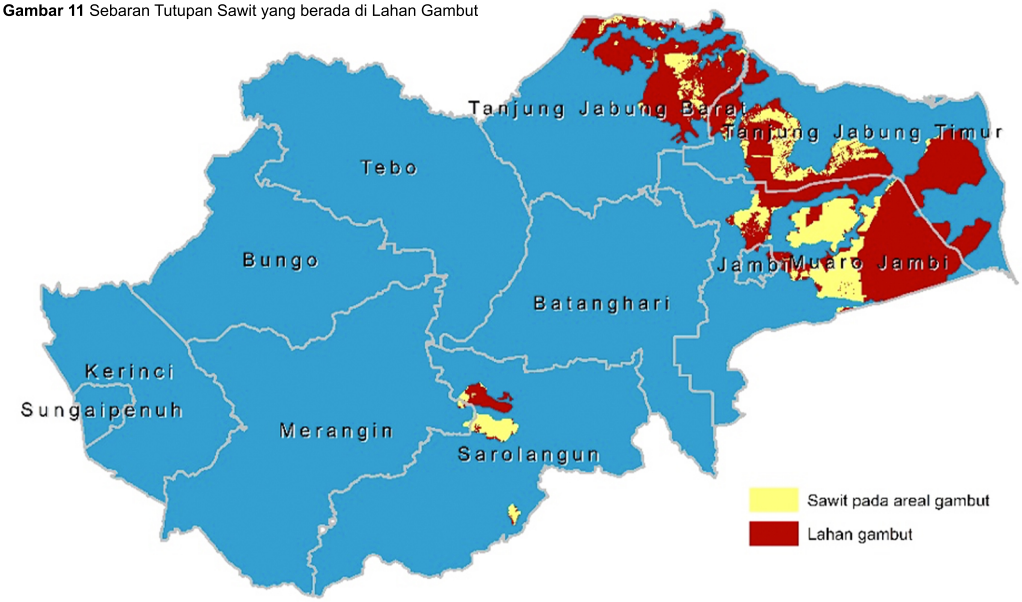
Tutupan sawit pada lahan gambut yang paling besar

Kabupaten Muaro Jambi

76,783.11 hektare

Hasil *overlay* tutupan sawit dan lahan gambut menunjukkan bahwa tutupan sawit saat ini yang berada pada lahan gambut telah mencapai 15.58 persen dari total tutupan sawit yang berhasil diidentifikasi. Tutupan sawit pada lahan gambut yang paling besar terdapat di Kabupaten Muaro Jambi dengan luas 76,783.11 hektare. Luas dan sebaran tutupan sawit pada lahan mineral dan lahan gambut di Provinsi Jambi dapat dilihat pada Tabel 19 dan Gambar 11.

Gambar 11 Sebaran Tutupan Sawit yang berada di Lahan Gambut



2. Areal HGU pada Lahan Gambut

Ketersediaan lahan yang terbatas menjadi salah satu faktor penyebab pembukaan perkebunan sawit di lahan gambut. Lahan gambut menjadi pilihan walaupun dinilai membutuhkan biaya yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan perkebunan sawit di tanah mineral.

Overlay HGU dan lahan gambut di Provinsi Jambi dilakukan untuk mengetahui pemegang HGU yang terdapat pada lahan gambut. Hasil *overlay* menunjukkan bahwa 70.180,54 hektare areal HGU atau 24,47 persen dari total luas HGU (Tabel 7) berada pada lahan gambut. Areal HGU terbesar yang berada di lahan gambut dimiliki oleh PT. Kresna Duta Agroindo dengan luas 9.085,25 hektare. Daftar pemegang HGU yang berada di lahan gambut Provinsi Jambi secara detail dapat dilihat pada Tabel 20.

Tabel 20 Daftar Pemegang HGU yang Berada pada Lahan Gambut Tahun 2018

No	Pemegang HGU	Luas (ha)
1	Koperasi Bina Bersama	269,93
2	Koperasi Indah Jaya	75,65
3	Koperasi Mekar Jaya	895,41
4	Koperasi Puding Sejahtera	828,01
5	Koperasi Sinar Mulia Rezeki	970,95
6	KUD Wahana Jaya	1.226,68
7	PT. Agro Tumbuh Gemilang Abadi	1.231,60
8	PT. Agrotamex Sumindoabadi	268,28
9	PT. Aneka Pura Multikerta	703,95
10	PT. Bahari Gembira Ria	1.698,48
11	PT. Bara Eka Prima	572,04
12	PT. Borneo Karya Cipta	732,66
13	PT. Brahma Bina Bakti	453,35
14	PT. Bukit Bintang Sawit	154,72
15	PT. Cakrawala Agro Persada	159,35
16	PT. Era Mitra Agro Lestari	2.513,10
17	PT. Erasakti Wiraforestama	6.422,67
18	PT. Fajar Pematang Indah Lestari	703,98
19	PT. Felda Indo Mulia	586,22
20	PT. Hazrin Nurdin Nusaphala	468,27
21	PT. Indonusa Agromulia	1.756,71
22	PT. Jambi Agro Wiyana	6.989,63
23	PT. Jambi Batanghari Plantation	722,01
24	PT. Kaswari Unggul	2.828,88
25	PT. Kharisma Kemingking	856,72
26	PT. Kresna Duta Agroindo	9.085,25

27	PT. Kurnia Sawit Yanto Bersaudara	960,49
28	PT. Mendahara Agro Jaya Industri	3.235,19
29	PT. Menderang Planta Karpusa	34,88
30	PT. Metro Yakin Jaya	95,47
31	PT. Muaro Kahuripan Indonesia	1.008,68
32	PT. Petaling Mandraguna	1.588,85
33	PT. Puri Hijau Lestari	3.274,64
34	PT. Rickim Mas Jaya Sakti	2.532,85
35	PT. Ricky Kurniawan Kertapersada	3.817,62
36	PT. Sawit Mas Plantation	1.168,60
37	PT. Sumbertama Nusa Pertiwi	7.133,92
38	PT. Sungai Bahar Pasifik Utama	399,95
39	PT. Taman Sari Agro Lestari	27,67
40	PT. Trimitra Lestari	48,28
41	PT. Wana Seponjen Indah	1.678,97
Total		***70.180,54***

Sumber: Hasil olahan (2018)

BAB IV
Penutup

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diperoleh dalam studi ini meliputi:

1. Luas tutupan sawit Provinsi Jambi tahun 2019 yaitu 792.145,79 hektare dengan potensi produksi TBS tahun 2020 sebesar 12.317.287,23 ton.

2. Potensi penerimaan negara atas pajak PBB dan PPN dari perkebunan sawit Provinsi Jambi tahun 2020 yaitu Rp 2.916.966.486.273,45.

3. Terdapat *gap* antara realisasi PBB dan PPN untuk seluruh sektor di Provinsi Jambi tahun 2020 dengan nilai yang ditargetkan. Bahkan, *gap* antara realisasi dan target dari seluruh sektor semakin lebar dibandingkan dengan nilai potensi (hanya) dari satu sektor yakni sektor sawit.

4. Jumlah pemegang HGU perkebunan sawit di Provinsi Jambi yang berhasil diidentifikasi yaitu 118 HGU dengan total luas 286.762,67 hektare. Pemegang HGU didominasi oleh PBS sebanyak 113 HGU, dan PBN sebanyak 5 HGU. Sementara luas perkebunan mandiri yang berhasil diidentifikasi adalah 16.914,95 hektare.

5. Terdapat kesenjangan data pengusahaan perkebunan sawit di Provinsi Jambi. Banyak perusahaan sawit di Jambi secara eksisting beroperasi tanpa HGU namun tidak dikategorikan sebagai perkebunan besar.

6. Luas tutupan sawit yang berada di dalam kawasan hutan yaitu 94.940,95 hektare atau sekitar 11,99 persen dari total luas tutupan sawit Provinsi Jambi. Sementara, areal HGU yang berada di dalam Kawasan hutan seluas 6.891,75 hektare atau 2,40 persen dari total luas HGU Provinsi Jambi.

7. Tutupan sawit yang berada pada lahan gambut seluas 147,181.30 hektare atau 15.58 persen dari total tutupan sawit yang berhasil diidentifikasi. Dan, areal HGU yang berada di lahan gambut seluas 70.180,54 hektare atau 24,47 persen dari total luas HGU Provinsi Jambi.

B. Rekomendasi

Rekomendasi hasil studi ini diuraikan sebagai berikut:

Target:

Meningkatnya penerimaan pajak sektor kelapa sawit di Provinsi Jambi

Indikator:

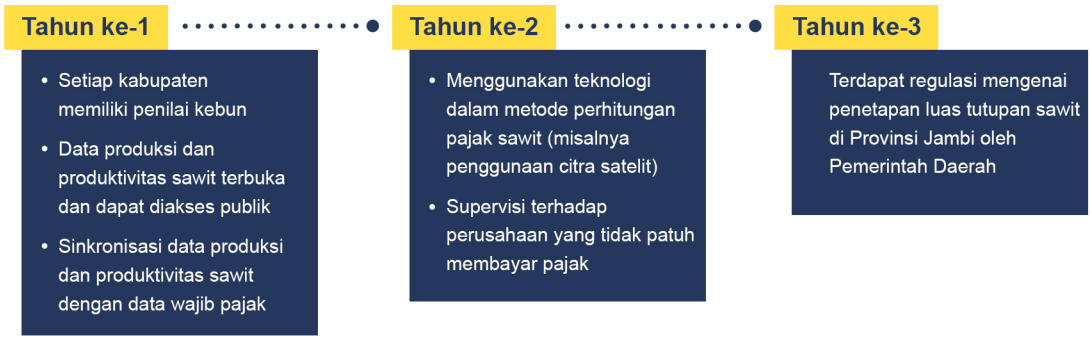
1. Transparansi dan tersedianya data dan informasi perpajakan dan perkelapasawitan. Dan, data tersebut saling terhubung antar lembaga pemerintahan dan antar level pemerintahan (Pemerintah Daerah, Kementerian Pertanian cq Direktorat Jenderal Perkebunan, Dinas Perkebunan Provinsi, Kementerian Keuangan cq Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Argaria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional).

2. Meningkatnya tindakan dan supervisi terhadap perusahaan yang tidak patuh membayar pajak (Direktorat Jenderal Pajak , Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, Penilai Kebun).

3. Tersedianya laporan realisasi pajak di sektor kelapa sawit di setiap tahun (Direktorat Jenderal Pajak , Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama)

4. Terdapat *benchmark* produktivitas TBS (Direktorat Jenderal Perkebunan, Dinas Perkebunan Provinsi)

Rencana Waktu



Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. 2019. *Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2019*. Url: https://www.bps.go.id/publication/2020/11/30/36cba77a73179202def4ba14/statistik-kelapa-sawit-indonesia-2019.html. Diakses pada pukul 10:05 tanggal 24 Juni 2021.

Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. 2021. *Luas tanaman perkebunan menurut provinsi.* Url: https://www.bps.go.id/indicator/54/131/1/luas-tanaman-perkebunan-menurut-provinsi.html. Diakses pada pukul 11:14 tanggal 14 Juni 2021.

Budianto E, Rahayu E, Firmansyah E. (2016). *Kajian Produksi Dan Karakter Agronomi Kelapa Sawit Pada Lahan Mineral Dan Lahan Gambut Di PT Subur Arum Makmur 2. Jurnal Agromast, 1(2).*

Climate Policy Initiative. 2015. *Improving Land Productivity through Fiscal Policy: Early Insights on Taxation in the palm oil supply chain*. Climate Policy Initiative, San Francisco, CA.

Dinas Perkebunan Provinsi Jambi. 2019. Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit 2019. Url: http://jambi.litbang.pertanian.go.id/ind/images/PDF/2018/2018.04.27-Program-Pembangunan-Perkebunan-Provinsi-Jambi-Tahun-2019.pdf. Diakses pada pukul 10:16 tanggal 24 Juni 2021.

Ditjen AHU. 2020. *Profile Terakhir Perusahaan PT Erasakti Wiraforestama*. Diakses pada pukul 11:08 tanggal 9 Juli 2021.

Index Mundi. 2020. *Palm Oil Production by Country in 1000 MT*. Url: https://www.indexmundi.com/agriculture/?commodity=palm-oil. Diakses pada tanggal 9 Agustus 2020.

Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi. 2020. *Kajian FIskal Regional Triwulan I 2020*. Url: https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/images/file_artikel/file_pdf/kfr/tw1_2020/06_kfr_tw1_2020_jambi.pdf. Diakses pada tanggal 24 Juni 2021.

Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi. 2020. *Kajian FIskal Regional Tahun 2020*. Url: https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/images/file_artikel/file_pdf/kfr/tw3_2020/6-KFR_TW3_2020_Jambi-min.pdf. Diakses pada tanggal 24 Juni 2021.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2021. *APBN Kita Kinerja dan Fakta*. Edisi Januari.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 2019. *Statistik Perkebunan Indonesia 2018-2020*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perkebunan.

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 833/KPTS/SR.020/M/12/2019 Tentang Penetapan Luas Tutupan Kelapa Sawit Indonesia Tahun 2019.

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. 2016. *Kajian Sistem Pengelolaan Komoditas Kelapa Sawit*. Jakarta: Direktorat Penelitian Dan Pengembangan Kedeputian Bidang Pencegahan.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengaturan Dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 186/PMK.03/2019 Tentang Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139/PMK.03/2014 Tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

Peraturan Pemerintah No 128 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). 2015. Litbang Pemanfaatan Data Penginderaan Jauh Untuk Identifikasi Perkebunan, Lapan. Jakarta.

Rosalina L, Irlan, Rizal M. 2020. *Optimalisasi Penerimaan Negara Sektor Perkebunan Sawit Sulawesi Tengah*. Jakarta: TuK INDONESIA.

Salmiyati, Heryansyah A, Idayu I, Supriyanto E. (2014). *Oil Palm Plantations Management Effects on Productivity Fresh Fruit Bunch (FFB)*. APCBEE procedia. 8:282–286.

Sari DAP, Falatehan AF, Ramadhonah RY. (2019). *The Social And Economic Impacts of Peat Land Palm Oil Plantation in Indonesia*. *Journal of Physics: Conference Series* 1364(1): 1–8.

Soedomo S, Kartodihardjo H, Hendrayanto, Wibowo AB, Adinugraha AG, Hadijah S, Prihatmaja H, Lewenussa A dan Prasetyo AR. 2018. *Tata Kelola Perkebunan Sawit di Indonesia: Studi Kasus di Provinsi Riau dan Kalimantan Barat*. Bogor: Forci Development.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-149/PJ/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-64/PJ 2010.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan.

WALHI Jambi. 2019. *Potret Lingkungan Hidup Jambi 2019*. Jambi: WALHI Jambi.

Transformasi untuk Keadilan Indonesia
Jl. Arzimar 1 No.26 RT 001 RW 009, Tegal
Gundil, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor
Jawa Barat, 16153 - Indonesia
Tlp. +62 251 836 7837
Email: office@tuk.or.id
www.tuk.or.id